



**LAPORAN KINERJA  
KECAMATAN PRAMBON  
KABUPATEN SIDOARJO  
TAHUN 2016**



**Disusun :  
TAHUN 2016**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenannya Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016, sesuai amanat dari PEMENPAN Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja. Secara substantif Laporan Kinerja Pemerintahan Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo merupakan wadah bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja.

Isi dari Laporan Kinerja pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijaksanaan operasional di daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo, serta penjelasan tentang kinerja, capaian kinerja dan analisis capaian kinerja.

Laporan Kinerja Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 merupakan media pertanggungjawaban yang dikaitkan dengan Rencana Strategis Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 – 2021, hal ini merupakan wujud dari keinginan Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo untuk dapat menyajikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel, dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya *Clean Government* dan *Good Governance*.

Namun demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo.



Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Sidoarjo, Desember 2016

**CAMAT PRAMBON**

**FREDIK SUHARTO,S.Sos,MM**

Pembina

NIP. 19700202 199101 1 002



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI .....	3
DAFTAR TABEL .....	5
DAFTAR GRAFIK .....	6
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	7
BAB I : PENDAHULUAN .....	8
1.1. Latar belakang .....	8
1.2. Gambaran Umum SKPD .....	8
a) Struktur Organisasi .....	9
b) Tugas Pokok dan Fungsi .....	12
c) Kondisi SKPD (Internal & Eksternal) .....	19
BAB II : PERENCANAAN KINERJA .....	27
2.1. Keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD .....	27
2.2. Perencanaan Strategis .....	30
a) Matriks Rencana Strategis .....	30
b) Program dan Kegiatan .....	21
2.3. Perjanjian Kinerja .....	26
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA .....	27
3.1. Pengukuran Kinerja .....	xx
a) Pengukuran Kinerja Tujuan .....	xx
b) Pengukuran Kinerja sasaran .....	xx
c) Pengukuran Kinerja Program dan Kegiatan .....	
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	xx
a) Evaluasi Capaian Kinerja Per-Sasaran .....	xx
b) Perkembangan (Tren) Capaian Kinerja .....	xx
c) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan .....	xx
d) Program dan Kegiatan yang mendukung .....	xx



3.3. Akuntabilitas Keuangan .....	xx
a. Realisasi Anggaran .....	xx
b. Alokasi Anggaran Per Sasaran .....	
3.4 Efektifitas dan Efisiensi Kinerja	
a. Pencapaian Kinerja dan Anggaran	
b. Efisiensi Penggunaan Anggaran	
BAB IV : PENUTUP .....	xx



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Susunan Kepegawaian Dan Kelengkapan .....	11
Tabel 2. Pegawai Berdasarkan Jabatan .....	12
Tabel 3. Pegawai Berdasarkan Golongan .....	13
Tabel 4. Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	xx
Tabel 5. RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010-2015 .....	xx
Tabel 6. 16 Program dan 37 Kegiatan Kecamatan Prambon .....	xx
Tabel 7. Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan .....	xx
Tabel 8. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran .....	xx
Tabel 9. Capaian Persentase penerbitan KTP .....	xx
Tabel 10. Capaian Persentase penerbitan KK .....	xx
Tabel 11. Capaian Persentase penerbitan Surat Keterangan Waris .....	xx
Tabel 12. Capaian Persentase penerbitan Surat Perubahan Hak Atas Tanah .....	xx
Tabel 13. Capaian Persentase penerbitan Surat Keterangan Pencari Kerja .....	xx
Tabel 14. Capaian Persentase penerbitan IMB .....	xx
Tabel 15. Capaian Persentase penerbitan Legalitas Salinan Dokumen .....	xx
Tabel 16. Capaian Jumlah koordinasi dan fasilitas di bidang pembangunan dan Pemerintahan yang ditindaklanjuti .....	xx
Tabel 17. Capaian Persentase Desa yang sudah menyusun APBDes tepat waktu..	xx
Tabel 18. Capaian Persentase Desa yang sudah menyusun LPPD tepat waktu .....	xx
Tabel 19. Capaian Persentase Desa yang sudah melaksanakan Musrenbang tepat waktu .....	xx
Tabel 20. Program / Kegiatan yang mendukung Tahun Anggaran 2015 .....	xx
Tabel 21. Target dan Realisasi Belanja Tahun 2015 .....	xx
Tabel 22. Target dan realisasi belanja per Program/Kegiatan tahun 2015 .....	xx



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Capaian Persentase penerbitan KTP .....	xx
Grafik 2. Capaian Presentase penertiban KK .....	xx
Grafik 3. Capaian Presentase penertiban Surat Keterangan Waris .....	xx
Grafik 4. Capaian Presentase penertiban Surat Perubahan Hak Atas Tanah .....	xx
Grafik 5. Capaian Presentase penertiban Surat Keterangan Pencari Kerja .....	xx
Grafik 6. Capaian Presentase penertiban IMB .....	xx
Grafik 7. Capaian Persentase penertiban Legalitas Salinan Dokumen .....	xx
Grafik 8. Capaian Jumlah koordinasi dan fasilitasi di bidang pembangunan dan pemerintahan yang ditindaklanjuti .....	xx
Grafik 9. Capaian Persentase Desa yang sudah menyusun APBDdes tepat Waktu	xx
Grafik 10. Capaian persentase Desa yang sudah menyusun LPPD tepat waktu ...	xx
Grafik 11. Capaian Persentase Desa yang sudah melaksanakan Musrenbang tepat waktu .....	xx



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 merupakan media pertanggungjawaban yang dikaitkan dengan Rencana Strategis Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 – 2021, hal ini merupakan wujud dari keinginan Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo untuk dapat menyajikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel, dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya *Clean Government* dan *Good Governance*.

Dalam kurun waktu lima tahun Kantor Camat Prambon mempunyai tugas yang sangat besar dalam meningkatkan kinerja terkait dengan permasalahan pembangunan yang sangat kompleks. Kecamatan Prambon melaksanakan 7 program dan 37 kegiatan dengan alokasi dana bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2016.

Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, terdapat penyempurnaan target Indikator Kinerja pada tahun 2016. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Kecamatan Prambon Tahun 2016, disampaikan sebagai berikut:



**Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2016**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	% Capaian	Kategori
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	80	Berhasil
2.	Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan dan pembangunan.	Persentase hasil koordinasi bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	100%	Sangat Berhasil
		Persentase hasil koordinasi bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	100%	Sangat Berhasil
		Persentase hasil koordinasi bidang keamanan dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	100%	Sangat Berhasil
		Persentase hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti	100%	Sangat Berhasil
		Persentase hasil koordinasi bidang pembangunan fisik yang ditindaklanjuti	100%	Sangat Berhasil
3.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa yang sudah menyusun APBDesa sesuai dengan Juknis	99.90%	Sangat Berhasil
		Persentase desa yang sudah menyusun LPPD sesuai dengan Juknis	100%	Sangat Berhasil
		Persentase desa yang sudah melaksanakan musrenbang desa sesuai dengan Juknis	100%	Sangat Berhasil

**Keterangan:**

No.	% Capaian	Kategori
1.	Lebih dari 90%	Sangat Berhasil
2.	75% s.d Kurang Dari 90%	Berhasil
3.	50% s.d Kurang Dari 75%	Cukup
4.	Kurang Dari 50%	Kurang



Setelah Kecamatan Prambon melakukan Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis , selanjutnya analisa keberhasilan dan kegagalan yaitu dapat meliputi penjelasan keberhasilan dan kegagalan dan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menghadapi permasalahan - permasalahan pencapaian kinerja tersebut, serta rencana tindakan apa yang akan dilakukan untuk pencapaian yang lebih baik. Kendala / Permasalahan yang dihadapi :

1. Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan

Hambatan :

2. Sasaran 1 : Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan dan pembangunan.

Hambatan :

3. Sasaran 1 : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa

Hambatan :

Upaya Kecamatan Prambon yang telah dilakukan dalam menghadapi permasalahan - permasalahan pencapaian kinerja tersebut, serta rencana tindakan apa yang akan dilakukan untuk pencapaian yang lebih baik adalah dengan :

1. Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan

Upaya :

2. Sasaran 1 : Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan dan pembangunan.

Upaya :

3. Sasaran 1 : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa

Upaya :



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016, sesuai amanat dari PEMENPAN Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja. Secara substantif Laporan Kinerja Pemerintahan Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo merupakan wadah bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja.

Laporan Kinerja pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan operasional di daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo, serta penjelasan tentang kinerja, capaian kinerja dan analisis capaian kinerja.

Laporan Kinerja Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 merupakan media pertanggungjawaban yang dikaitkan dengan Rencana Strategis Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2021, hal ini merupakan wujud dari keinginan Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo untuk dapat menyajikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel, dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya *Clean Government* dan *Good Governance*.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode lima tahun. Renstra SKPD dibuat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan jangka



Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Rencana Jangka Panjang maupun Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Fungsi Renstra SKPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam pembangunan daerah. Renstra SKPD, memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengantugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RJPMD) yang bersifat indikatif. Renstra SKPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari RPJMD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

RPJMD disusun berisi indikasi program pemerintah daerah selama lima tahun kedepan, selanjutnya diterjemahkan kedalam Rencana Strategis Kabupaten dan Rencana Strategis SKPD. Rencana Strategis SKPD sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan SKPD (Renja SKPD). Dalam tahun berjalan, pelaksanaan Renja ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh SKPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Renstra Kecamatan Prambon merupakan suatu upaya dan proses yang dilakukan agar dapat mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Prambon. Dalam upaya mencapai misi dan tujuan strategis, salah satunya adalah dengan melakukan kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki agar dapat mengambil peluang yang ada dan mampu mengantisipasi tantangan yang menghadang untuk didokumentasikan dalam bentuk Renstra Kecamatan. Dengan demikian Kecamatan Prambon dapat menunjukkan eksistensinya sebagai instansi penyelenggara pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang prima.

Perencanaan pembangunan meliputi empat tahapan yaitu (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana.



Rencana Pembangunan Tahunan yang disebut Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun. Rencana Kerja disusun berpedoman pada Renstra- SKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan prioritas pembangunan. Pelaksanaan pembangunan tidak hanya dilaksanakan oleh Pemerintah tetapi perlu mendorong partisipasi masyarakat. Perencanaan pembangunan disusun secara sistematis, terarah dan terpadu berdasar prioritas yang ada dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki dan koordinasi antar pelaku pembangunan.

## 1.2. Gambaran Umum Kecamatan Prambon

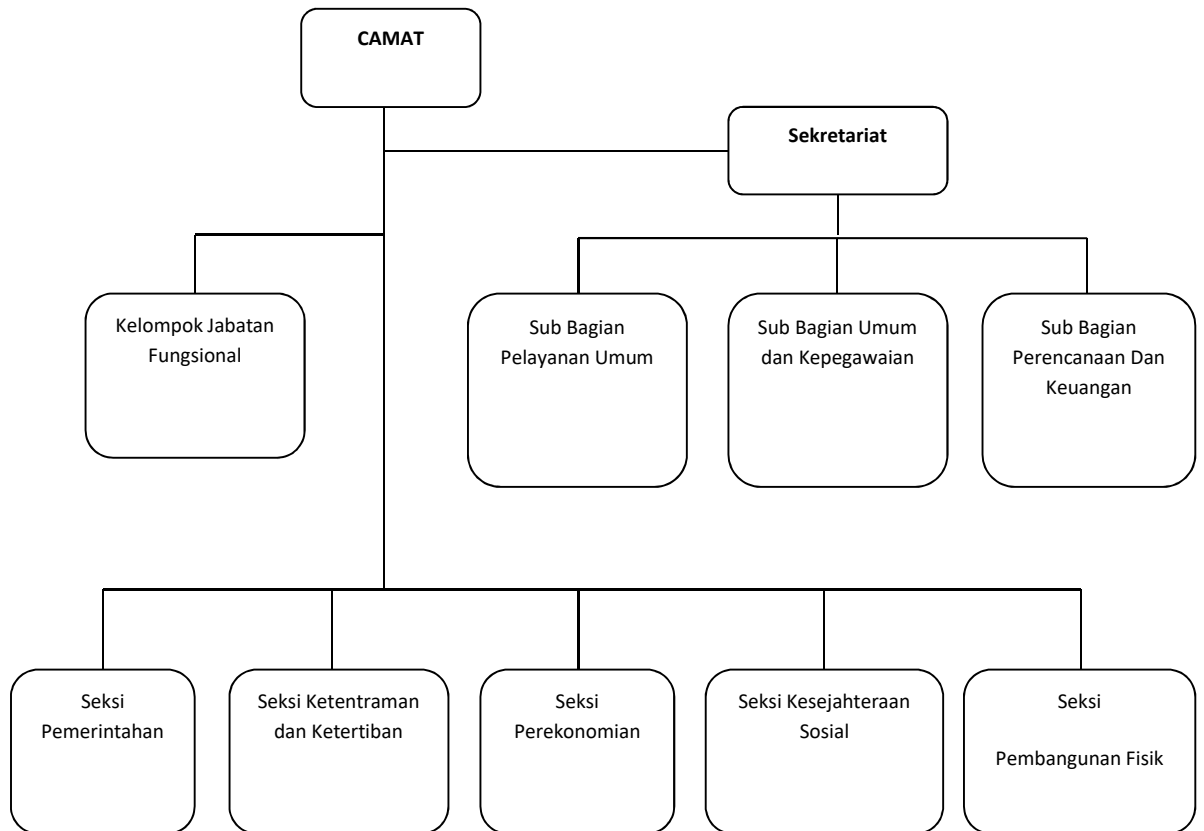
### a) Struktur Organisasi Kecamatan Prambon

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Kecamatan terdiri dari :

- a. *Unsur Pimpinan* : *Camat*
- b. *Unsur Pembantu Pimpinan* : *Sekretaris Camat*
  - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - Sub Bagian Pelayanan Umum
- c. *Unsur Pelaksana* : *Seksi-seksi terdiri dari :*
  - Seksi Pemerintahan
  - Seksi Ketertamanan dan Ketertiban
  - Seksi Pembangunan Fisik
  - Seksi Kesejahteraan Sosial
  - Seksi Perekonomian
- d. *Kelompok Jabatan Fungsional*



**Bagan 1. Struktur Organisasi Kecamatan Prambon**





## b) Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Prambon

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri.

Keberadaan Kantor Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo yang lahir sebagai konsekuensi otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 11 UU No. 32 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu kewenangan bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan suatu daerah. Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kab. Sidoarjo. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2008 Bupati Sidoarjo Nomor tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo. Berikut tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan Prambon adalah:

### 1. Camat

Camat menjalankan tugas-tugas atributif sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri nomor 7 tahun 2014 yaitu menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yaitu :

- a) Mengkoordinasikan Penyelenggaraan kegiatan bidang pemerintahan;
- b) Mengkoordinasikan penyelenggaraan Kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- c) Mengkoordinasikan penyelenggaraan Kegiatan bidang perekonomian;
- d) Mengkoordinasikan penyelenggaraan Kegiatan bidang kesejahteraan Sosial;
- e) Mengkoordinasikan penyelenggaraan Kegiatan bidang pembangunan fisik;



- f) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya/yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/kelurahan;
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Selain tugas atributif di atas, Camat juga menjalankan tugas delegatif, yaitu menjalankan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2014 pada bidang-bidang :

- a. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;
- b. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. Pekerjaan Umum;
- d. Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. Perhubungan;
- f. Tenaga Kerja;
- g. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- i. Perindustrian dan Perdagangan.

## 2. Sekretaris Camat

Memimpin, merencanakan, mengatur, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan sekretariat dalam rangka melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh unit kerja pemerintah Kecamatan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan program kerja Pemerintah Kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Sekretaris Camat mempunyai fungsi :

- a) Merumuskan dan melaksanakan program kerja Sekretariat Kecamatan;





- b) Melaksanakan penyusunan rencana program, pengumpulan dan pengelolaan data serta pelaporan kegiatan kecamatan;
- c) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi - seksi;
- d) Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan, kepegawaian, rumah tangga perlengkapan dan keprotokolan;
- e) Melaksanakan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Umum;
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya;

### 3. Seksi Pemerintahan

Seksi pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok antara lain memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan pemerintah, administrasi kependudukan dan pertanahan lingkup Kecamatan dalam rangka menunjang lancarnya pelaksanaan tugas. Kepala seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan Rencana Kerja di bidang pemerintahan;
- b) Pelaksanaan program kerja di bidang urusan pemerintahan;
- c) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang urusan pemerintahan;
- d) Pelaksanaan dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pemerintahan;
- e) Evaluasi Rancangan Perdes tentang APBDes;
- f) Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Kepala Desa;
- g) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan pemanfaatan aset desa;
- h) Monitoring dan pembinaan pengisian Jabatan Kepala Desa (pilkades), perangkat desa dan BPD;
- i) Pelantikan Kepala Desa;
- j) Memandu pengucapan sumpah / janji anggota BPD;
- k) Penanganan konflik pemerintahan;



- l) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya.

#### 4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban (TRANTIB)

Seksi ketentraman dan ketertiban dipimpin oleh seorang kepala seksi dengan tugas pokok antara lain : memimpin, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan pembinaan kesejahteraan dan ketertiban wilayah serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas lapangan polisi pamong praja dikecamatan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Kepala seksi Trantib mempunyai fungsi berikut:

- a) Penyusunan Rencana Kerja di bidang ketentraman dan ketertiban;
- b) Pelaksanaan program kerja di bidang urusan ketentraman dan ketertiban;
- c) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang urusan ketentraman dan ketertiban;
- d) Pelaksanaan dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang ketentraman dan ketertiban;
- e) Penanganan konflik sosial dalam lingkungan kecamatan;
- f) Penertiban adanya pelanggaran - pelanggaran pendirian bangunan diatas sempadan dan diatas saluran tersier;
- g) Pembinaan dan penertiban pandangan kaki lima;
- h) Merekomendasikan ijin penutupan/penggunaan jalan lokal/desa di wilayah kecamatan setempat untuk kegiatan di luar kegiatan transportasi;
- i) Melaksanakan pembinaan dan pengaturan kendaraan tidak bermotor (becak dan dokar) di wilayah kecamatan setempat;
- j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.



## 5. Seksi Perekonomian, Fisik, Sarana dan Prasarana

Seksi Perekonomian, Fisik, Sarana dan Prasarana dikepalai oleh seorang Kepala Seksi dengan tugas pokok sebagai berikut : memimpin, merencanakan, mengatur, serta mengkoordinasikan kegiatan urusan pelayanan umum yang meliputi inventarisasi kekayaan Kelurahan, kebersihan serta sarana dan prasarana lingkup Kecamatan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka menunjang lancarnya pelaksanaan tugas dinas. Sedangkan fungsi dari Kepala Seksi Perekonomian, Fisik, Sarana dan Prasarana adalah :

- a) Penyusunan Rencana Kerja di bidang perekonomian;
- b. Pelaksanaan program kerja di bidang urusan perekonomian;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang urusan perekonomian;
- d. Pelaksanaan dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang perekonomian;
- e. Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan perdesaan;
- f. Pemberdayaan ekonomi penduduk miskin;
- g. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan teknologi tepat guna (TTG);
- h. Pelaksanaan Pengelolaan data profil desa dan kelurahan
- i. Penyelenggaraan penyuluhan penumbuhan wirausaha baru;
- j. Penciptaan hubungan kemitraan antara industri kecil, menengah dan besar dengan lembaga ekonomi perdesaan;
- k. Penataan lokasi pedagang kaki lima (PKL);
- l. Promosi produk industri dan dagang kecil/mikro;
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.



## 1. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dikepalai oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok antara lain memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan pendataan dan pembinaan kesejahteraan sosial lingkup Kecamatan dalam rangka menunjang lancarnya pelaksanaan tugas dinas. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Rencana Kerja di bidang kesejahteraan sosial;
- b. Pelaksanaan program kerja di bidang urusan kesejahteraan sosial;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang urusan kesejahteraan sosial;
- d. Pelaksanaan dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang kesejahteraan sosial;
- e. Pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, HAM dan politik;
- f. Pelaksanaan sosialisasi pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangg (KDRT);
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dalam peningkatan ekonomi lokal (P3EL);
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan dan pembinaan program kecamatan ramah anak (CaRa);
- i. Pengkoordinasian peningkatan keikut sertaan masyarakat ber KB, termasuk kesetaraan dan keadilan gender partisipasi KB pria;
- j. Pelaksanaan pembinaan kader bina keluarga balita (BKB), bina keluarga remaja (BKR) dan bina keluarga lansia (BKL);
- k. Pengkoordinasian pelaksanaan program kesehatan reproduksi remaja (KRR) serta pencegahan generasi muda dari ancaman HIV/IADS;



- l. Pelaksanaan pembinaan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS);
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2. Seksi Pembangunan Fisik

Seksi Pembangunan Fisik dikepalai oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok antara lain memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan pendataan dan pembinaan Pembangunan Fisik Kecamatan dalam rangka menunjang lancarnya pelaksanaan tugas dinas. Kepala Seksi Pembangunan Fisik mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Rencana Kerja di bidang pembangunan fisik;
- b. Pelaksanaan program kerja di bidang urusan pembangunan fisik;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang urusan pembangunan fisik;
- d. Pelaksanaan dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pembangunan fisik;
- e. Pemeliharaan rutin jalan lokal desa;
- f. Pemeliharaan dan pengawasan jalan lingkungan dan drainase micro di wilayah permukiman;
- g. Pelaksanaan gerakan penanaman pohon lindung diruang jalan desa;
- h. Pembinaan dan pengelolaan sampah sampai transfer depo (TPS);
- i. Inventarisasi data aset milik pemerintah daerah;
- j. Pemeliharaan saluran tersier;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.



### 3. Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan urusan perencanaan dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan penyusunan perencanaan program;
- b. Pengelolaan administrasi keuangan termasuk gaji pegawai;
- c. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaannya;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

### 4. Kasubag Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- b. Melaksanakan pengelolaan barang;
- c. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.



## 5. Kasubag Pelayanan Umum

Sub Bagian Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pengelolaan Pelayanan Umum. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan;
- b. Melaksanakan administrasi umum kepada masyarakat;
- c. Menerima, melaporkan, serta menindak lanjuti pengaduan masyarakat sesuai dengan kapasitas lingkup sekretariat;
- d. Melaksanakan pelayanan IMB rumah tinggal dan pemutihan IMB rumah tinggal (baru dan renovasi) dengan luas bangunan dibawah 200m<sup>2</sup>;
- e. Melaksanakan Pelayanan SKTS (Surat Keterangan Tinggal Sementara);
- f. Melaksanakan pelayanan legalitas salinan dokumen kependudukan;
- g. Melaksanakan pelayanan AK I - AK V;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya;

### c) Kondisi SKPD (Internal & Eksternal)

#### 1. Gambaran Umum Kantor Kecamatan Prambon

Wilayah Kecamatan Prambon terletak pada posisi sangat strategis baik dilihat dari lingkup Regional Sidoarjo, maupun secara publik karena letaknya berbatasan langsung dengan pusat pendidikan. Wilayah Kecamatan Prambon juga merupakan wilayah penyangga ( buffer Zone) Kecamatan Prambon memiliki luas wilayah ± 3417,90 Ha, yang terdiri atas dataran tinggi dan dataran rendah dengan ketinggian 500-1500 M diatas permukaan laut (DPL) suhu udara berkisar antara 18°C sampai dengan 25°C.



Wilayah Kecamatan Prambon terdiri dari 20 (dua puluh ) desa yaitu:

1. Desa Prambon
2. Desa Kajartengguli
3. Desa Kedungwonokerto
4. Desa Bendotretek
5. Desa Watutulis
6. Desa Simogirang
7. Desa Temu
8. Desa Wonoplintahan
9. Desa Cangkringturi
10. Desa Jedongcangkring
11. Desa Jati Alun-Alun
12. Desa Jatikalang
13. Desa Gampang
14. Desa Bulang
15. Desa Simpang
16. Desa Wirobiting
17. Desa Pejangkungan
18. Desa Kedungkembar
19. Desa Kedungsugo
20. Desa Gedangrowo

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Prambon adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan Dengan Kecamatan Krian
- Sebelah Timur Berbatasan Dengan Kecamatan Tulangan
- Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Kecamatan Mojosari
- Sebelah Barat Berbatasan Dengan Kecamatan Tarik

## 2. Sistem, Prosedur Dan Mekanisme





Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan tata kerja sebagai berikut :

- a. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan pada Kecamatan Kabupaten Sidoarjo wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo serta dengan instansi vertikal sesuai bidang tugasnya;
- b. Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahan;
- c. Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan, masing-masing Subbagian di Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan;
- e. Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;
- f. Setiap pimpinan wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing.

### 3. Sumber Daya Manusia pada Kantor Kecamatan Prambon



Ditinjau dari jumlah, jenis kelamin, tingkat pendidikan formal dan pendidikan penjejangan aparatur, maka kondisi aparatur dapat diuraikan sebagai berikut:

### **Jumlah Jabatan Struktural di Kantor Kecamatan Prambon**

Jumlah pejabat struktural yang terisi = 8 orang dengan komposisi ketersediaan sebagai berikut:

- a. Esselon II = 0 Orang
- b. Esselon III = 2 Orang
- c. Esselon IV = 6 Orang

### **Jumlah pegawai tetap (PNS)**

Seluruhnya berjumlah **38** orang

Pegawai honorer 10 orang

- laki-laki : 8 Orang
- perempuan : 2 Orang

### Tingkat pendidikan formal

- Pendidikan S2 : 2 Orang
- Pendidikan S1 : 15 Orang
- D-III : 4 Orang
- Pendidikan SMU : 23 Orang
- Pendidikan SLTP : - Orang
- Pendidikan SD : 3 Orang
- Jumlah : 33 Orang

### Tingkat pendidikan penjejangan

- Pendidikan Pimpinan II : 0 Orang
- Pendidikan Pimpinan III : 2 Orang
- Pendidikan Pimpinan IV : 6 Orang
- Jumlah : 8 Orang



Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Prambon didukung dengan ketersediaan dan kemampuan sumberdaya aparatur, sarana prasarana, serta pengelolaan anggaran. Jumlah pegawai yang bekerja di Kecamatan Prambon sampai dengan tahun 2016 sebanyak 48 orang yang terbagi dalam Sekretariat 5 Seksi dan Sekretaris Desa berstatus PNS. Kondisi kepegawaian berdasarkan Eselon digambarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.

## Susunan Kepegawaian Dan Kelengkapan

No	Uraian	Golongan								Honorer			Jml
		IV		III		II		I		L	P	JML	
		L	P	L	P	L	P	L	P				
1	Camat	1											1
2	Sekretariat	1		3	3	1	1						9
3	Seksi Pemerintahan			2			1						3
4	Seksi Pembangunan Fisik			1									1
5	Seksi Kesos					1							1
6	Seksi Trantib			1		5							6
7	Seksi Perekonomian			1									1
8	Sekretaris Desa/ kades			2		9							11
9	Tenaga Honorer									8	2		10
	JUMLAH	2		10	3	15	2			8	2		43

Berdasarkan Data tersebut diatas, Sekretariat menjalankan Fungsi Koordinasi secara Intensif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan melakukan konsultasi dengan SKPD di Kabupaten untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.



Jumlah pegawai di Kantor Kecamatan Prambon sebanyak 50 orang dengan rincian:

2. Pegawai Berdasarkan Jabatan :

**Tabel 3.**  
**Pegawai Berdasarkan Jabatan**

No.	Uraian	L	P	Jumlah
1.	Pejabat Struktural	7	1	8
2.	Staf	10	5	15
3.	Tenaga Teknis/Fungsional	-	-	-
4.	Pengaman Kantor	-	-	-
5.	Sekretaris Desa	10	-	10
6.	Tenaga Honorer	8	2	10
Jumlah		35	7	43

Kondisi Kepegawaian Kecamatan Prambon berdasarkan jabatan dapat dilihat pada tabel 2. Terdapat kekosongan jabatan pada pejabat struktural ini disebabkan oleh adanya 2 orang pegawai struktural pensiun di akhir tahun 2015 dan awal tahun 2016. Terdapat kekosongan pada posisi Pejabat Struktural yaitu Kasi Pemerintahan dan Kasi Kesos. Selain itu Kecamatan Prambon memiliki 20 Desa dan . Berdasarkan Data tersebut diatas akan berdampak pada kinerja Kantor Kecamatan Prambon, Sekretariat akan menjalankan Fungsi Koordinasi secara kurang Intensif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan.



## 3. Pegawai Berdasarkan Golongan :

Tabel 4.

## Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Uraian	L	p	Jumlah
1.	Golongan IV	2	-	2
2.	Golongan III	10	3	13
3.	Golongan II	15	3	18
4.	Golongan I	-	-	-
5.	Honorar	8	2	10
	<b>Jumlah</b>	<b>35</b>	<b>8</b>	<b>43</b>

Kondisi Kepegawaian Kecamatan Prambon berdasarkan Golongan dapat dilihat pada tabel 3. Kapabilitas Karyawan berkaitan erat dengan tingkat Golongannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel 3, tingkat Pendidikan Karyawan Kecamatan yang paling banyak adalah Golongan 2. Secara Normatif merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan Kinerja Kecamatan secara umum dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kecamatan.

## 4. Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

Tabel 5.

## Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Uraian	L	P	Jumlah
1.	Pasca Sarjana	3	1	3
2.	Sarjana	9	6	15
3.	Diploma	1	3	4
4.	SLTA	13	10	23
5.	SLTP	-	-	-
6.	SD	3	-	3
	<b>Jumlah</b>	<b>37</b>	<b>16</b>	<b>43</b>



Kondisi Kepegawaian Kecamatan Prambon berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 4. Kapabilitas Karyawan berkaitan erat dengan tingkat Pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel 4, tingkat Pendidikan Karyawan Kecamatan yang paling banyak adalah Lulusan SLTA. Secara Normatif merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan Kinerja Kecamatan secara umum. Jumlah Karyawan yang menamatkan Pendidikan S1 cukup Besar tercatat 20 (Dua Puluh) orang, ini juga menjadi modal dasar yang besar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Prambon

#### 1. Pegawai Berdasarkan Usia

**Tabel 6.**  
**Kondisi Kepegawaian Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo**  
**Pegawai Berdasarkan Usia Tahun 2016**

No	Uraian	Kelompok Usia				Jumlah
		20-30	31-40	41-50	51-60	
1	Camat			1		1
2	Sekretariat	2	2	4	2	10
3	Seksi Pemerintahan			2		2
4	Seksi Pembangunan Fisik				1	1
5	Seksi Kesos		1			1
6	Seksi Trantib		1	4		5
7	Seksi Perekonomian				1	1
8	Sekretaris Desa		1	5	4	10
9	Tenaga Honorer	5	3	1	1	10
<b>Jumlah</b>		7	8	16	9	43



Kondisi Kepegawaian Kecamatan Prambon berdasarkan Usia dapat dilihat pada tabel 5. Produktifitas Karyawan selain terkait dengan Kompetensi atau terkait dengan Pendidikan juga terkait dengan Usia. Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel 5, kelompok usia Karyawan Kecamatan Prambon yang paling banyak adalah Kelompok usia 41 – 50 Jumlah Karyawan yang masuk dalam kategori usia Puncak Kelompok usia produktif usia 41-50 Tahun. merupakan kelompok usia yang produktifitasnya kurang, sehingga kinerja ini akan mempengaruhi Kinerja Kecamatan.

#### 5. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Prambon telah tersedia sarana dan prasarana meliputi :

##### **Sarana :**

- Kendaraan roda empat	:	3 Unit
- Kendaraan khusus (patroli)	:	1 Unit
- Kendaraan roda dua	:	15 Unit
- Leptop	:	6 Unit
- Komputer	:	17 Unit
- Printer	:	10 Unit
- Mesin Foto Copy	:	1 Unit
- Mesin Scanner	:	2 Unit
- Mesin Ketik	:	1 Unit
- LCD	:	1 Unit

##### **Prasarana :**

Gedung Kantor Kecamatan Prambon : 2 Unit ( $\pm$  2.200 M<sup>2</sup>)

Penggunaan kantor terdiri dari :

- Kantor Kecamatan



- Pendopo
- Ruang aula
- Ruang dinas instansi
- Ruang PKK
- Musholla
- Tempat Parkir
- Kantor PBB
- Rumah Dinas Camat

#### 6. Ketersediaan SOP (Standart Operasional Prosedur)

SOP adalah suatu set instruksi (perintah kerja) terperinci dan tertulis yang harus diikuti demi mencapai keseragaman dalam menjalankan suatu pekerjaan tertentu (*detailed, written instructions to achieve uniformity of the performance of a specific function*) dengan berpedoman pada tujuan yang harus dicapai.

Standard Operating Procedures (SOP) SKPD Kecamatan Prambon ditetapkan demi terwujudnya tertib administrasi dalam pelaksanaan roda pemerintahan, mulai dari pemerintahan terendah (Desa/Kelurahan) sampai dengan Pemerintah Pusat. Dengan ditetapkannya Standard Operating Procedures, diharapkan bisa meminimalisir terjadinya penyimpangan tugas-tugas pokok dan fungsi pemerintahan. Untuk menunjang kinerja Pemerintahan, Pemerintah Daerah memutuskan untuk mensosialisasikan dan menetapkan Standard Operating Procedures ( SOP ) kepada masing-masing instansi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Penyusunan standar operasional prosedur sebagai pedoman Kecamatan Prambon guna mengukur dan menilai kemampuan SDM secara objektif. Jadi, SOP wajib dijadikan pedoman dasar dalam pelaksanaan tugas rutin atau sehari-hari di semua Aparatur Kecamatan Prambon.





Dalam konsep manajemen yang tepat, dalam proses pelaksanaannya wajib dilakukan audit SOP secara berkala untuk mengetahui apakah SOP tersebut masih perlu dilakukan perubahan atau perbaikan guna penyempurnaan sebuah sistem.

Fungsi Betapa Pentingnya SOP sbb:

1. Memahami alur atau Metode kerja yang harus dijalankan;
2. Memahami tingkat kesulitan dan kerumitan suatu pekerjaan (target achievement);
2. Melihat fungsi dan authorisasi pemegang jabatan (authorized).

Dalam rangka peningkatan pelayanan publik dilingkungan Kecamatan Prambon telah ditetapkan standar operasional prosedur. Standar Operasional Prosedur dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas/aparat Kecamatan Prambon demi terwujudnya tertib administrasi dalam pelaksanaan roda pemerintahan. SOP Kantor Kecamatan Prambon Berikut SOP yang ada di Kantor Kecamatan Prambon:

- a. VISI “ PELAYANAN SEPENUH HATI ”.
- b. MISI Mewujudkan Pelayanan Prima dan berkualitas pada masyarakat guna terciptanya Aparatur Kecamatan yang Profesional dan Menumbuhkan sikap usaha mandiri masyarakat guna meningkatkan tingkat kesejahteraan dan perekonomian di Kecamatan Prambon
- c. MOTTO “KAMI BERTEKAD BEKERJA UNTUK MASYARAKAT, MENGUTAMAKAN PELAYANAN MASYARAKAT PRIMA DAN PROFESIONALISME MENUJU KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”.
- d. RUANG LINGKUP TUGAS
  - Melayani bidang kependudukan;
  - Melayani bidang ketenagakerjaan;
  - Melayani bidang perijinan;
  - Melayani bidang kesehatan;
  - Melayani bidang pertanahan.
- e. JENIS PELAYANAN



1. Bidang Kependudukan, meliputi:
  - Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el);
  - Pelayanan Kartu Keluarga (KK);
- c. Pelayanan Surat Pindah Datang;
  - Pelayanan Surat Pindah Keluar;
  - Pelayanan Pengumuman Akte Perkawinan Non Muslim ;
2. Bidang Ketenagakerjaan, meliputi:
  - Pelayanan Surat Keterangan Pencari Kerja;
  - Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
3. Bidang Perijinan dan Penanaman Modal:
  - Pembuatan dan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tinggal Non
  - Tingkat Non Perumahan dengan luas di bawah 200 M<sup>2</sup>;
  - Pelayanan Rekomendasi Izin Keramaian sebelum ke POLSEK ;
  - Bidang Kesehatan Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
5. Bidang Pertanahan, meliputi:
  - Pelayanan Pengesahan Surat Keterangan Waris.
  - Pelayanan Surat Perubahan Hak atas Tanah:
  - Pelayanan Surat Pelepasan Hak atas Tanah.

Sebagai suatu lembaga pemerintahan yang berbasis pada pelayanan masyarakat, Kantor Kecamatan Prambon bertanggungjawab untuk mewujudkan Pelayanan Prima dan Berkualitas pada Masyarakat guna terciptanya Aparatur Kecamatan yang Profesional demi terwujudnya kesejahteraan Masyarakat.



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1. Keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD

Rencana strategis (Renstra) merupakan suatu langkah awal yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (sumber daya modal dan sumber daya manusia) dalam mencapai strategi yang ditetapkan. Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi maka Pemerintah Daerah baik itu propinsi maupun Kabupaten/Kota diberikan wewenang untuk melaksanakan pembinaan manajemen pegawai negeri sipil daerah dalam satu kesatuan penyelenggaraan manajemen pegawai negeri sipil secara nasional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 bahwa Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mempunyai kewajiban untuk menyusun dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam periode lima tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dan diperjelaskan dengan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Perencanaan strategik instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional sehingga pembangunan berjalan efektif, bersasaran dan sinkron dengan pembangunan nasional dan pembangunan provinsi.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo 2015-2021 merupakan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidoarjo yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006.

RPJMD 2016-2021 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Untuk pelaksanaan lebih lanjut, RPJMD akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Strategi Pembangunan Daerah menurut RPJMD Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2021 yang dijabarkan melalui renstra SKPD Kantor Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo, dilaksanakan dengan menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah, yang diharapkan mampu mengarahkan setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan fokus pada pencapaian tujuan dan sasaran, ditetapkan arah kebijakan daerah/SKPD yang berisi kebijakan umum, program, dan kegiatan.

RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat tahapan-tahapan program dan kegiatan pembangunan serta pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada untuk mencapai visi dan misi yang telah ditentukan selama periode tersebut. Dokumen perencanaan ini disusun melalui proses yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah no. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo menyusun RPJMD, mulai dari tahap persiapan, penyusunan rancangan awal, rancangan RPJMD, musyawarah perencanaan pembangunan, perumusan rancangan akhir RPJMD, hingga penetapan RPJMD sebagai sebuah Peraturan Daerah. Proses penyusunan RPJMD tersebut melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan Kabupaten Sidoarjo.



RPJMD Kabupaten Sidoarjo perlu dijabarkan ke dalam dokumen perencanaan yang lebih terinci untuk memudahkan pelaksanaannya. Setiap tahunnya RPJMD perlu dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk dijadikan dasar pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tiap tahunnya.

RKPD memuat rencana program dan kegiatan pembangunan, pendanaan dan kinerja pembangunan tiap tahun untuk seluruh urusan pemerintahan daerah. Selain itu, RPJMD dijabarkan ke dalam rencana strategis (Renstra) setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk melaksanakan rencana pembangunan periode 2016-2021 di urusan pembangunan yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk memudahkan pelaksanaan pembangunan tiap urusan di setiap tahunnya, dibuat dokumen rencana kerja (Renja) SKPD yang mengacu pada program dan kegiatan di Renstra SKPD dan menjabarkan RKPD di tahun yang bersesuaian.

Kebijakan Umum RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 merupakan benang merah dari Strategi dan Arah Kebijakan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Kebijakan Umum menggambarkan tentang bagaimana keterkaitan antara Strategi yang telah ditentukan dengan pilihan dan pelaksanaan programnya. Sehingga Gambaran umum memberikan petunjuk operasional mengenai bagaimana Strategi dan Arah Kebijakan yang telah ditentukan akan diimplementasikan melalui berbagai program yang ada dalam RPJMD. Pilihan program unggulan serta program prioritas di masing-masing misi yang disinergikan dengan strategi agar lebih tepat/terstruktur, maka diperlukan kebijakan yang memenuhi minimal empat perspektif sebagai berikut :

- a. Kebijakan umum pada perspektif masyarakat atau layanan yang didesain tidak hanya untuk masyarakat tertentu saja, namun lebih dari itu semua lapisan difasilitasi guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih berkeadilan. Pada sisi ini Pemerintah berfungsi sebagai fasilitator dalam pelayanan sosial serta penyediaan kebutuhan/hak dasar masyarakat.



- b. Kebijakan umum pada perspektif proses internal, antara lain diarahkan guna mengantisipasi kompleksitas beban kerja pemerintahan dalam merespon tuntutan internal organisasi maupun eksternal pelayanan kepada masyarakat (domestik dan internasional) dengan lebih baik. Arahannya ini ditujukan agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan lebih fleksibel serta dalam upaya untuk meningkatkan profesionalisme aparat sipil negara.
- c. Kebijakan umum pada perspektif kelembagaan antara lain diarahkan pada optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi baik melalui upaya perbaikan Regulasi (administrasi), pengembangan Skill dan Manajemen Sumber Daya Manusia baik pada sisi perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya, dan optimalnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai penunjang kinerja birokrasi, serta kontrol (masyarakat).
- d. Kebijakan umum pada perspektif keuangan, dilakukan melalui optimalisasi desain Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah dan Kebijakan Pembiayaan Daerah. Kebijakan Pendapatan daerah dilakukan antara lain melalui optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), peningkatan peran dan fungsi UPT dan Balai Penghasil guna meningkatkan pelayanan dan pendapatan, peningkatan pengelolaan asset dan keuangan daerah, serta optimalisasi penerimaan Dana Perimbangan. Kebijakan Belanja daerah dioptimalkan untuk menambah porsi Belanja Langsung, serta secara simultan dilakukan upaya-upaya efisiensi anggaran guna mendorong peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Program Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam RPJMD merupakan instrumen penting dan strategis dalam mewujudkan target pembangunan daerah. Program pembangunan tersebut merupakan acuan bagi seluruh SKPD di Kabupaten Sidoarjo untuk menyusun serangkaian kegiatan yang diperlukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.



Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo/SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategisnya sebagai penjabaran dari visi dan misi organisasi. Program adalah instrumen kebijakan yang didukung satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan atau lembaga masyarakat yang dikoordinasikan oleh SKPD terkait serta telah memperoleh alokasi anggaran. Kegiatan adalah aktivitas langsung untuk mendukung tindak aktivitas kepentingan masyarakat yang terukur.

Perencanaan strategis (Renstra) yang merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan atau rangkaian pengambilan keputusan berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun, yang secara sistematis dan berkesinambungan serta dengan memperhatikan dan mempertimbangkan lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan eksternal (peluang dan tantangan).

Perencanaan strategis (Renstra) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global.

Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban sekaligus instrumen manajemen kinerja, perencanaan yang dimaksud disini adalah perencanaan strategis (Renstra) yang merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis (Renstra) instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar dapat mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.



Dalam Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa perencanaan strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis Instansi Pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) terlampir dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. IKU (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Instansi Pemerintah melakukan Analisis dan Evaluasi Kinerja dengan memperhatikan Capaian Indikator Kinerja Utama. Analisis dan Evaluasi Kinerja dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada berupa kendala, hambatan, dan informasi lainnya.

Perencanaan kinerja (Renstra) merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan





dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Penyusunan Renstra Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo 2016-2021 mempertimbangkan rencana pemanfaatan dan pengembangan tata ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo, seperti yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo. Program pemanfaatan dan pengembangan tata ruang dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2016-2021 disesuaikan dengan indikasi program yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Sidoarjo 2009-2029 di lima tahun kedua. Berbagai indikasi program RTRW Kabupaten Sidoarjo lima tahun kedua yang tercakup dalam RPJMD.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2016-2021 juga mempertimbangkan rencana tata ruang wilayah Jawa Timur dan kabupaten/kota lain yang berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo, yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Pasuruan dan Mojokerto. Dalam RTRW Provinsi Jawa Timur, khususnya dalam arahan sistim perkotaan Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo merupakan bagian strategis dalam unsur Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Beberapa rencana tata ruang yang menjadi pertimbangan antara lain:

- a. pengembangan Kasawan Agropolitas di Kabupaten Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, Malang dan Bangkalan;
- b. pengembangan kawasan industri dan perdagangan di perbatasan antara Kabupaten Sidoarjo dengan Kota Surabaya, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Mojokerto.

Dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan, dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/ sektor lain.



Perencanaan strategis (Renstra) Kecamatan Prambon memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

**Tabel 2.1.**  
**Keterkaitan RPJMD Kabupaten Sidoarjo dan Rensra Kecamatan Prambon Tahun 2015-2021**

MISI RPJMD Kab. Sidoarjo	TUJUAN RPJMD Kab. Sidoarjo	SASARAN RPJMD Kab. Sidoarjo	Tujuan Renstra SKPD	Sasaran Renstra SKPD
Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif, aspiratif, partisipasif dan transparan	Meningkatkan kualitas organisasi perangkat daerah dan tatakelola pemerintahan daerah yang aspiratif, partisipasif dan transparan	Terwujudnya Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah Yang Efektif dan Efisien	a. Meningkatkan kualitas pelayanan; b. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan kegiatan bidang pemerintahan dan Pembangunan;	1. Meningkatnya pengetahuan, SDM Aparatur Pemerintah Kecamatan dan desa dalam memberikan pelayanan masyarakat; 2. Tertibnya administrasi perkantoran dan kearsipan, sehingga terwujudnya tertib administrasi; 3. Meningkatnya koordinasi lintas sektor ditingkat Kecamatan, sehingga dapat mewujudkan pelayanan dan birokrasi yang cepat dan tepat; 4. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan, sehingga masyarakat dapat berperan aktif mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan.
		Terwujudnya tatakelola Pemerintahan Desa Yang Baik	c. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa;	5. Terwujudnya pemerintah desa yang profesional dalam memberikan Pelayanan Prima kepada masyarakat, sehingga pelayanan di ditingkat desa dapat dilaksanakan seefisien mungkin;

Pelaksanaan Program Kecamatan Prambon diharapkan dapat mendukung salah satu tujuan pembangunan daerah tahun 2016-2021 yaitu ***Kabupaten Sidoarjo yang Inovatif, Mandiri, Sejahtera dan Berkelanjutan***". Adapun sasaran yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Prambon dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam RPJMD pada Misi Kesatu RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 "*Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif, aspiratif, partisipasif dan transparan*".

Untuk mendukung terselenggaranya tugas pokok fungsi selaras dengan Misi RPJMD Kabupaten Sidoarjo dan Misi Renstra Kecamatan Prambon yang telah ditetapkan maka stragegi, kebijakan dan Programd yang akan dicapai oleh Kecamatan Prambon yaitu :



**Tabel 2.2.**  
**Stategi, Kebijakan, dan Program Kecamatan Prambon**  
**Untuk Mendukung RPJMD Kabupaten Sidoarjo**  
**Tahun 2016-2021**

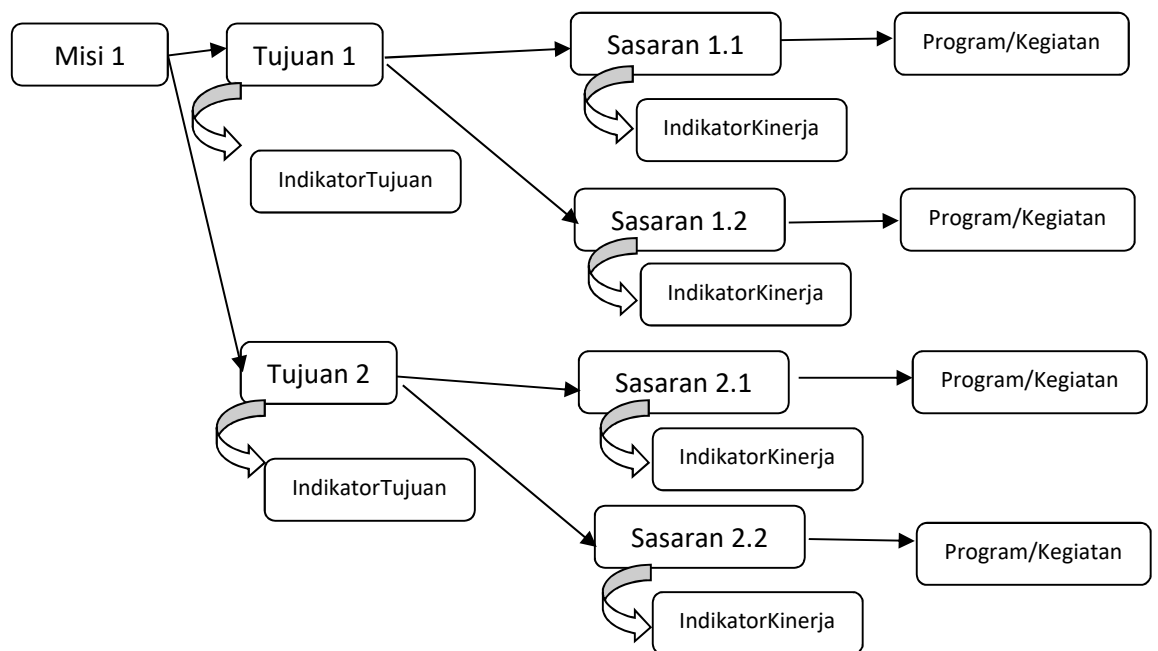
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM
Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif, aspiratif, partisipatif dan transparan	Meningkatkan kualitas organisasi perangkat daerah dan tatakelola pemerintahan daerah yang aspiratif, partisipatif dan transparan	Terwujudnya Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah Yang Efektif dan Efisien	<p>a. Mengupayakan kualitas personil agar pelayanan dapat berjalan secara optimal;</p> <p>b. Menertibkan administrasi perkantoran dan kearsipan;</p> <p>c. Menyelenggarakan pelatihan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan kinerja aparatur SDM di tingkat Desa dan Kecamatan;</p> <p>d. Memberikan ketrampilan kepada petugas pelayanan;</p> <p>e. Menciptakan suasana kerja yang kondusif dan kekeluargaan;</p> <p>f. Memberikan sarana dan prasarana yang memadai;</p> <p>g. Meningkatkan partisipatif masyarakat;</p>	<p>1. Memberikan Pelayanan yang terbaik kepada masyarakat</p> <p>2. Mengelola tata laksana penyelenggaraan pemerintahan secara efektif</p> <p>3. Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, desa/ kelurahan serta masyarakat</p>	<p>1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</p> <p>2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</p> <p>3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur</p> <p>4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</p> <p>5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Disiplin Aparatur</p> <p>6. Program penyelenggaraan pelayanan umum</p> <p>7. Program koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, pemberdayaan sosial masyarakat dan ketentraman ketertiban umum.</p>
		Terwujudnya tatakelola Pemerintahan Desa Yang Baik	h. Melaksanakan koordinasi yang intensif dengan instansi di tingkat Kecamatan	4. Mengembangkan budaya Pemerintahan bersih, akuntabel, transparan dan bebas korupsi	1. Program koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, pemberdayaan sosial masyarakat dan ketentraman ketertiban umum.



## 2.2. Perencanaan Strategis

### a) Matriks Rencana Strategis

Matriks Hubungan Misi, Tujuan , Sasaran , Indikator Kinerja dan Program/Kegiatan



Program pembangunan dan rencana kegiatan indikatif yang dituangkan dalam Rencana Strategis Kantor Camat Prambon Tahun 2016-2021 disusun dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021. Renstra SKPD Kecamatan Prambon ini disusun untuk mendukung Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Dalam kurun waktu lima tahun Kantor Camat Prambon mempunyai tugas yang sangat besar dalam meningkatkan kinerja terkait dengan permasalahan pembangunan yang sangat kompleks. Kecamatan Prambon melaksanakan 7 program dan 37 kegiatan dengan alokasi dana bersumber dari APBD. Adapun rincian alokasi dana selama lima tahun dalam pelaksanaan program/kegiatan di Kecamatan Prambon adalah pada matrik terlampir dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini.



## b) Program dan Kegiatan

Strategi Pembangunan Daerah menurut RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 - 2021 yang dijabarkan melalui Renstra SKPD Kantor Kecamatan Prambon, dilaksanakan dengan menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah, yang diharapkan mampu mengarahkan setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan fokus pada pencapaian tujuan dan sasaran, ditetapkan arah kebijakan daerah/SKPD yang berisi kebijakan umum, program dan kegiatan.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo/SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategisnya sebagai penjabaran dari visi dan misi organisasi.

Program adalah instrumen kebijakan yang didukung satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan atau lembaga masyarakat yang dikoordinasikan oleh SKPD terkait serta telah memperoleh alokasi anggaran.

Kegiatan adalah aktivitas langsung untuk mendukung tindak aktivitas pemerintahan, pembangunan dan pemenuhan kepentingan masyarakat yang terukur.

Sesuai dengan Renstra SKPD dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat, budaya, kemampuan SDM aparatur, indentifikasi permasalahan dan tantangan yang sedang dan akan dihadapi serta Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, maka tujuan dan sasaran Kantor Kecamatan Prambon guna terciptanya profesionalitas kinerja aparatur, dengan tujuan, sasaran dan indikator.



Proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik (Renstra). Strategi pembangunan daerah menurut RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 yang dijabarkan melalui Renstra SKPD Kantor Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo, dilaksanakan dengan menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah, yang diharapkan mampu mengarahkan setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan fokus pada pencapaian tujuan dan sasaran, ditetapkan arah kebijakan daerah/SKPD yang berisi kebijakan umum, program, dan kegiatan.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Prambon adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu 1 tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Kecamatan Prambon pada tahun 2016 memiliki 7 Program dan 46 Kegiatan terlampir dalam lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini.

### **2.3. Perjanjian Kinerja**

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati Sidoarjo sebagai pemberi amanah kepada Camat Prambon sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati Sidoarjo sebagai pemberi amanah dan Camat Prambon sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.



Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja disusun setelah Kecamatan Prambon menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan. Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Tingkat Eselon II dan Eselon III sasaran yang digunakan menggambarkan *outcome* dan *output* pada bidangnya serta menggunakan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Prambon dan Indikator Kinerja lain yang relevan.

Terdapat Perubahan Target Indikator Kinerja pada tahun 2016 dengan ditetapkannya RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 serta adanya Perubahan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2016. Perubahan ini berdasarkan surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 11 Oktober 2016 Nomor : 005/6271/404.1.3.1/2016 perihal Penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2016 terlampir dalam lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini.



## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Prambon yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2016.

#### 3.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses mencatat, mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dan anggaran dalam arah pencapaian misi melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, ataupun suatu proses pelayanan publik. Dalam mengukur kinerja, diperlukan indikator kinerja non finansial dan indikator finansial.

Tujuan Kecamatan Prambon adalah melayani kebutuhan masyarakat dengan sebaik-baiknya, yang dilaksanakan dengan melaksanakan program. Kinerja Kecamatan Prambon tidak dapat diukur dengan rasio-rasio yang biasa didapatkan dari sebuah laporan keuangan seperti return on investment, jumlah sumber daya yang digunakan atau rasio pendapatan dibandingkan dengan sumber daya yang digunakan. Hal ini disebabkan karena sebenarnya dalam kinerja pemerintah tidak pernah ada “net profit”.





Kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan sendirinya dipenuhi dengan menyampaikan informasi yang relevan sehubungan dengan hasil dari program yang dilaksanakan Kecamatan Prambon. Manfaat adanya pengukuran kinerja di Kecamatan Prambon, yaitu:

1. Pengukuran kinerja meningkatkan mutu pengambilan keputusan.

Seringkali keputusan yang diambil Kecamatan Prambon dilakukan dalam keterbatasan data dan berbagai pertimbangan politik serta tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Proses pengembangan pengukuran kinerja ini akan memungkinkan Kecamatan Prambon untuk menentukan misi dan menetapkan tujuan pencapaian hasil tertentu. Di samping itu dapat juga dipilih metode pengukuran kinerja untuk melihat kesuksesan program yang ada. Di sisi lain, adanya pengukuran kinerja membuat Kecamatan Prambon dapat memfokuskan perhatian pada hasil yang didapat, memberikan evaluasi yang benar terhadap pelaksanaan anggaran serta melakukan diskusi mengenai usulan-usulan program baru.

2. Pengukuran kinerja meningkatkan akuntabilitas internal.

Dengan adanya pengukuran kinerja ini, secara otomatis akan tercipta akuntabilitas di Kecamatan Prambon, dari lini terbawah sampai teratas. Kecamatan Prambon pun kemudian akan bertanggungjawab kepada Bupati Sidoarjo. Dalam hal ini disarankan pemakaian system pengukuran standar seperti halnya management by objectives untuk mengukur outputs dan outcomes. Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintah.

3. Pengukuran kinerja meningkatkan akuntabilitas publik.

Meskipun bagi sebagian pihak, pelaporan evaluasi kinerja pemerintah kepada masyarakat dirasakan cukup menakutkan, namun publikasi laporan ini sangat penting dalam keberhasilan sistem pengukuran kinerja yang baik. Keterlibatan masyarakat terhadap pengambilan kebijakan pemerintah menjadi semakin besar dan kualitas hasil suatu program juga semakin diperhatikan.



4. Pengukuran kinerja mendukung perencanaan strategi dan penetapan tujuan.

Proses perencanaan strategi dan tujuan akan kurang berarti tanpa adanya kemampuan untuk mengukur kinerja dan kemajuan suatu program. Tanpa ukuran-ukuran ini, kesuksesan suatu program juga tidak pernah akan dinilai dengan obyektif.

5. Pengukuran kinerja memungkinkan suatu entitas untuk menentukan.

penggunaan sumber daya secara efektif. Masyarakat semakin kritis untuk menilai program-program pokok Kecamatan Prambon sehubungan dengan meningkatnya pajak yang dikenakan kepada mereka. Evaluasi yang dilakukan cenderung mengarah kepada penilaian apakah Kecamatan Prambon memang dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam hal ini Kecamatan Prambon juga mempunyai kesempatan untuk menyerahkan sebagian pelayanan publik kepada sektor swasta dengan tetap bertujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik.

Dengan adanya pengukuran, analisis dan evaluasi terhadap data yang berkaitan dengan kinerja, Kecamatan Prambon dapat segera menentukan berbagai cara untuk mempertahankan atau meningkatkan efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan dan sekaligus memberikan informasi obyektif kepada publik mengenai pencapaian hasil (results) yang diperoleh. penelitian mengenai pelaksanaan program-program pengukuran kinerja Kecamatan Wonoayu. Model ini memberikan status yang jelas mengenai kondisi program-program pengukuran kinerja Kecamatan Prambon. Dengan pengamatan ini diharapkan Kecamatan Prambon juga lebih terfokus dalam menetapkan dan melaksanakan program pengukuran kinerja yang benar-benar menjadi prioritas.



Pelaksanaan kegiatan Kecamatan Prambon diharapkan dapat mendukung salah satu tujuan pembangunan daerah tahun 2016-2021. Adapun sasaran yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Prambon dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam RPJMD pada Misi Kesatu RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021. Indikator Kinerja Kecamatan Prambon yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Prambon dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel 3.1. dibawah ini.

**Tabel 3.1.**  
**Indikator Kinerja Kecamatan Prambon**  
**Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	70	75	80	85	90	95	100
2.	Persentase hasil koordinasi pada setiap bidang	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %	100 %	100 %
3.	Persentase desa yang sudah menyusun APBDesa sesuai dengan Juknis, Persentase desa yang sudah menyusun LPPD sesuai dengan Juknis dan Persentase desa yang sudah melaksanakan musrenbang desa sesuai dengan Juknis	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %	100 %	100 %

Tabel diatas merupakan komitmen Kecamatan Prambon untuk direalisasikan tahun 2016 sampai tahun 2021. Guna mengukur keberhasilan program Kecamatan Prambon yang telah ditetapkan, maka ditentukan Indikator Kinerja Utama sebagai sebuah indikator makro untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan di Kecamatan Prambon

**a) Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan.**

Pengukuran capaian kinerja tujuan tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya pada masing – masing indikator kinerja Tujuan, dan selanjutnya membandingkan antara realisasi tahun 2016 dengan realisasi tahun sebelumnya ( selama periode Renstra ). Realisasi Capaian Kinerja Tujuan Kecamatan Prambon Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 3.2. dibawah ini.

**Tabel 3.2.**  
**Realisasi Capaian Kinerja Tujuan**  
**Tahun 2016**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian 2016 (%)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan di Kecamatan Prambon.	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	75	77,71	104 %
2.	Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan dan pembangunan	Prosentase koordinasi dan fasilitasi di bidang pembangunan dan pemerintahan yang ditidaklanjuti	60 %	100 %	167 %
3.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa yang sudah menyusun APBDes, LPPD dan pelaksanaan Musrenbang tepat waktu.	60 %	100 %	167 %



Hasil pengukuran kinerja tujuan pada tahun 2016 telah memenuhi target yang telah di sepakati oleh Kantor Kecamatan Prambon. Kecamatan Prambon Tahun 2016 memiliki 3 tujuan yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan di Kecamatan Prambon

Tahun 2016 Kecamatan Prambon memiliki target pencapaian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 75 % sedangkan realisasinya sebesar 77,71 % dengan tingkat capaian 99 %, dari tingkat capaian 104 % dapat diambil kesimpulan bahwa Kecamatan Prambon pada tahun 2016 sudah dapat mencapai target yang sudah direncanakan pada awal tahun 2016. Sedangkan tahun 2015 Kecamatan Prambon memiliki target pencapaian 70 % sedangkan realisasinya sebesar 74 % dengan tingkat capaian 106 %, dari tingkat capaian 106 % dapat diambil kesimpulan bahwa Kecamatan Prambon pada tahun 2015 sudah dapat mencapai target yang sudah direncanakan pada awal tahun 2015.

Untuk memperoleh Survey Kepuasan Masyarakat ini Kecamatan Prambon Memberikan Quisioner kepada masyarakat untuk menilai kinerja kecamatan Prambon. Selanjutnya Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) ini dikirim ke Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo dan CV. Mitra Prima Utama untuk dilakukan penilaian atas kinerja Kecamatan Prambon selama Tahun 2016.



## 2. Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi di bidang Pembangunan dan Pemerintahan.

Tahun 2016 Kecamatan Prambon memiliki target pencapaian 60 % koordinasi dan fasilitasi di bidang Pembangunan dan Pemerintahan sedangkan realisasinya sebesar 100 % dengan tingkat capaian 167 %, dari tingkat capaian 167 % dapat diambil kesimpulan bahwa Kecamatan Prambon pada tahun 2016 sudah dapat mencapai target yang sudah direncanakan pada awal tahun 2016 dan telah memenuhi Renstra 2016-2021. Sedangkan tahun 2015 Kecamatan Prambon memiliki target pencapaian 50 % koordinasi dan fasilitasi di bidang Pembangunan dan Pemerintahan sedangkan realisasinya sebesar 100 % dengan tingkat capaian 200 %, dari tingkat capaian 200 % dapat diambil kesimpulan bahwa Kecamatan Prambon pada tahun 2015 sudah dapat mencapai target yang sudah direncanakan pada awal tahun 2015 dan telah memenuhi Renstra 2011-2015.

Kecamatan Prambon dari informasi diatas dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Prambon memiliki target yang rendah sehingga realisasi kinerjanya lebih tinggi dibanding target pada awal tahun. Terkait dengan kegiatan koordinasi dan fasilitasi di bidang Pembangunan dan Pemerintahan berimbas pada kurangnya anggaran Perjalanan Dinas yang berakibat pada akhir tahun banyak koordinasi dan fasilitasi di bidang Pembangunan dan Pemerintahan yang dalam pelaksanaan mengalami keterlambatan dan bahkan tidak terlaksana.

## 3. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa



Tahun 2016 Kecamatan Prambon memiliki target pencapaian 60 % meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa sedangkan realisasinya sebesar 100 % dengan tingkat capaian 167 %, dari tingkat capaian 167 % dapat diambil kesimpulan bahwa Kecamatan Prambon pada tahun 2016 sudah dapat mencapai target yang sudah direncanakan pada awal tahun 2016 dan telah memenuhi Renstra 2016-2021. Sedangkan tahun 2015 Kecamatan Wonoayu memiliki target pencapaian 50 % meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa sedangkan realisasinya sebesar 100 % dengan tingkat capaian 200 %, dari tingkat capaian 200 % dapat diambil kesimpulan bahwa Kecamatan Wonoayu pada tahun 2015 sudah dapat mencapai target yang sudah direncanakan pada awal tahun 2015 dan telah memenuhi Renstra 2011-2015. Kecamatan Prambon dari informasi diatas dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Prambon memiliki target yang rendah sehingga realisasi kinerjanya lebih tinggi dibanding target pada awal tahun.

**b) Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran.**

Pengukuran capaian kinerja sasaran tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (sebagaimana dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2016 perubahan) dengan realisasinya pada masing – masing indikator kinerja sasaran, dan selanjutnya juga membandingkan antara realisasi capaian kinerja sasaran tahun 2016 dengan realisasi tahun sebelumnya (selama periode Renstra). Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Prambon Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 3.3. dibawah ini.

**Tabel 3.3.**  
**Realisasi Capaian Kinerja Sasaran**  
**Tahun 2016**



No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian 2016 (%)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan di Kecamatan Prambon	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	75	77,71	104 %
2.	Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan dan pembangunan	Prosentase hasil koordinasi bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	60 %	100 %	167 %
		Prosentase hasil koordinasi bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	60 %	100 %	167 %
		Prosentase hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban yang ditindaklanjuti	60 %	99 %	165 %
		Prosentase hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti	60 %	100 %	167 %
		Prosentase hasil koordinasi bidang pembangunan fisik yang ditindaklanjuti	60 %	100 %	167 %
3.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa yang sudah menyusun APBDes sesuai dengan juklis	60 %	100 %	167 %
		Persentase desa yang sudah menyusun LPPD sesuai dengan juklis	60 %	100 %	167 %
		Persentase desa yang sudah melaksanakan Musrenbang desa sesuai dengan juklis	60 %	100 %	167 %

Hasil pengukuran kinerja sasaran pada tahun 2016 telah memenuhi target yang telah di sepakati oleh Kantor Kecamatan Prambon. Indikator Kinerja Sasaran adalah Indikator Kinerja Utama / Indikator Kinerja Kepala SKPD Kecamatan Prambon Tahun 2016 memiliki 3 sasaran yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan di Kecamatan Prambon





Tahun 2016 Kecamatan Prambon memiliki target pencapaian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 80 dari tingkat capaian 104 % dapat diambil kesimpulan bahwa Kecamatan Prambon pada tahun 2016 sudah dapat mencapai target yang sudah direncanakan pada awal tahun 2016. Sedangkan tahun 2015 Kecamatan Prambon memiliki target pencapaian 70 % sedangkan realisasinya sebesar 74 % dengan tingkat capaian 106 %, dari tingkat capaian 106 % dapat diambil kesimpulan bahwa Kecamatan Prambon pada tahun 2015 sudah dapat mencapai target yang sudah direncanakan pada awal tahun 2015.

Untuk memperoleh Survey Kepuasan Masyarakat ini Kecamatan Prambon Memberikan Quisioner kepada masyarakat untuk menilai kinerja kecamatan Prambon. Selanjutnya Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) ini dikirim ke Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo dan CV. Mitra Prima Utama untuk dilakukan penilaian atas kinerja Kecamatan Prambon selama Tahun 2016.

2. Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi di bidang Pembangunan dan Pemerintahan.
  - a) Prosentase hasil koordinasi bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti

Tahun 2016 Kecamatan Prambon memiliki target pencapaian 60 % hasil koordinasi bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti sedangkan realisasinya sebesar 100 % dengan tingkat capaian 167 %, dari tingkat capaian 167 % dapat diambil kesimpulan bahwa Kecamatan Prambon pada tahun 2016 sudah dapat mencapai target yang sudah direncanakan pada awal tahun 2016 dan telah memenuhi Renstra 2016-2021.

Sedangkan tahun 2015 Kecamatan Prambon memiliki target pencapaian 50 % hasil koordinasi bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti sedangkan realisasinya sebesar 100 % dengan tingkat capaian 200 %, dari tingkat capaian 200 % dapat diambil kesimpulan bahwa Kecamatan Prambon pada



tahun 2015 sudah dapat mencapai target yang sudah direncanakan pada awal tahun 2015 dan telah memenuhi Renstra 2011-2015.

Kecamatan Prambon dari informasi diatas dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Prambon memiliki target yang rendah sehingga realisasi kinerjanya lebih tinggi dibanding target pada awal tahun. Terkait dengan kegiatan hasil koordinasi bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti berimbas pada kurangnya anggaran Perjalanan Dinas yang berakibat pada akhir tahun banyak koordinasi bidang pemerintahan ditindaklanjuti kurang maksimal.

b) Prosentase hasil koordinasi bidang perekonomian yang ditindaklanjuti

Tahun 2016 Kecamatan Prambon memiliki target pencapaian 60 % hasil koordinasi bidang perekonomian yang ditindaklanjuti sedangkan realisasinya sebesar 100 % dengan tingkat capaian 167 %, dari tingkat capaian 167 % dapat diambil kesimpulan bahwa Kecamatan Prambon pada tahun 2016 sudah dapat mencapai target yang sudah direncanakan pada awal tahun 2016 dan telah memenuhi Renstra 2016-2021. Sedangkan tahun 2015 Kecamatan Prambon memiliki target pencapaian 50 % hasil koordinasi bidang perekonomian yang ditindaklanjuti sedangkan realisasinya sebesar 100 % dengan tingkat capaian 200 %, dari tingkat capaian 200 % dapat diambil kesimpulan bahwa Kecamatan Prambon pada tahun 2015 sudah dapat mencapai target yang sudah direncanakan pada awal tahun 2015 dan telah memenuhi Renstra 2011-2015.

Kecamatan Prambon dari informasi diatas dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Prambon memiliki target yang rendah sehingga realisasi kinerjanya lebih tinggi dibanding target pada awal tahun. Terkait dengan kegiatan hasil koordinasi bidang perekonomian yang ditindaklanjuti berimbas pada kurangnya anggaran Perjalanan Dinas yang berakibat pada



akhir tahun banyak koordinasi bidang Perekonomian ditindaklanjuti kurang maksimal.

c) Prosentase hasil koordinasi bidang Ketentraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti

Tahun 2016 Kecamatan Prambon memiliki target pencapaian 60 % hasil koordinasi bidang Ketentraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti sedangkan realisasinya sebesar 100 % dengan tingkat capaian 167 %, dari tingkat capaian 167 % dapat diambil kesimpulan bahwa Kecamatan Wonoayu pada tahun 2016 sudah dapat mencapai target yang sudah direncanakan pada awal tahun 2016 dan telah memenuhi Renstra 2016-2021. Sedangkan tahun 2015 Kecamatan Prambon memiliki target pencapaian 50 % hasil koordinasi bidang Ketentraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti sedangkan realisasinya sebesar 100 % dengan tingkat capaian 200 %, dari tingkat capaian 200 % dapat diambil kesimpulan bahwa Kecamatan Prambon pada tahun 2015 sudah dapat mencapai target yang sudah direncanakan pada awal tahun 2015 dan telah memenuhi Renstra 2011-2015.

Kecamatan Prambon dari informasi diatas dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Prambon memiliki target yang rendah sehingga realisasi kinerjanya lebih tinggi dibanding target pada awal tahun. Terkait dengan kegiatan hasil koordinasi bidang Ketentraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti berimbas pada kurangnya anggaran Perjalanan Dinas yang berakibat pada akhir tahun banyak koordinasi bidang Ketentraman dan Ketertiban ditindaklanjuti kurang maksimal.

d) Prosentase hasil koordinasi bidang Kesejahteraan Sosial yang ditindaklanjuti

Tahun 2016 Kecamatan Prambon memiliki target pencapaian 60 % hasil koordinasi bidang Kesejahteraan Sosial yang ditindaklanjuti sedangkan



realisasinya sebesar 99 % dengan tingkat capaian 165 %, dari tingkat capaian 165 % dapat diambil kesimpulan bahwa Kecamatan Prambon pada tahun 2016 sudah dapat mencapai target yang sudah direncanakan pada awal tahun 2016 dan telah memenuhi Renstra 2016-2021. Sedangkan tahun 2015 Kecamatan Prambon memiliki target pencapaian 50 % hasil koordinasi bidang Kesejahteraan Sosial yang ditindaklanjuti sedangkan realisasinya sebesar 100 % dengan tingkat capaian 200 %, dari tingkat capaian 200 % dapat diambil kesimpulan bahwa Kecamatan Prambon pada tahun 2015 sudah dapat mencapai target yang sudah direncanakan pada awal tahun 2015 dan telah memenuhi Renstra 2011-2015.

Kecamatan Prambon dari informasi diatas dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Prambon memiliki target yang rendah sehingga realisasi kinerjanya lebih tinggi dibanding target pada awal tahun. Terkait dengan kegiatan hasil koordinasi bidang Kesejahteraan Sosial yang ditindaklanjuti berimbas pada kurangnya anggaran Perjalanan Dinas yang berakibat pada akhir tahun banyak koordinasi bidang pemerintahan ditindaklanjuti kurang maksimal. Meski demikian terdapat penghematan anggaran berupa penurunan Belanja Alat Tulis Kantor dengan adanya Sisa anggaran pada kegiatan belanja Tersebut.

e) Prosentase hasil koordinasi bidang Pembangunan Fisik yang ditindaklanjuti

Tahun 2016 Kecamatan Prambon memiliki target pencapaian 60 % hasil koordinasi bidang Pembangunan Fisik yang ditindaklanjuti sedangkan realisasinya sebesar 100 % dengan tingkat capaian 167 %, dari tingkat capaian 167 % dapat diambil kesimpulan bahwa Kecamatan Prambon pada tahun 2016 sudah dapat mencapai target yang sudah direncanakan pada awal tahun 2016 dan telah memenuhi Renstra 2016-2021.

Sedangkan tahun 2015 Kecamatan prambon memiliki target pencapaian 50 % hasil koordinasi bidang Pembangunan Fisik yang ditindaklanjuti sedangkan realisasinya sebesar 100 % dengan tingkat capaian 200 %, dari



tingkat capaian 200 % dapat diambil kesimpulan bahwa Kecamatan Prambon pada tahun 2015 sudah dapat mencapai target yang sudah direncanakan pada awal tahun 2015 dan telah memenuhi Renstra 2011-2015.

Kecamatan Prambon dari informasi diatas dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Prambon memiliki target yang rendah sehingga realisasi kinerjanya lebih tinggi dibanding target pada awal tahun. Terkait dengan kegiatan hasil koordinasi bidang Pembangunan Fisik yang ditindaklanjuti berimbas pada kurangnya anggaran Perjalanan Dinas yang berakibat pada akhir tahun banyak koordinasi bidang Pembangunan Fisik ditindaklanjuti kurang maksimal.

### 3. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa

#### a) Persentase Desa yang sudah menyusun APBDes sesuai dengan juklis

Tahun 2016 Kecamatan Prambon memiliki target pencapaian 60 % sedangkan realisasinya sebesar 100 % dengan tingkat capaian 167 %, dari tingkat capaian 167 % dapat diambil kesimpulan bahwa Kecamatan Prambon pada tahun 2016 dapat mencapai target yang sudah direncanakan pada awal tahun 2016. Sedangkan tahun 2015 Kecamatan Prambon memiliki target pencapaian 100 % sedangkan realisasinya sebesar 99 % dengan tingkat capaian 106 %, dari tingkat capaian 106 % dapat diambil kesimpulan bahwa Kecamatan Prambon pada tahun 2015 sudah dapat mencapai target yang sudah direncanakan pada awal tahun 2015.

#### b) Persentase Desa yang sudah menyusun LPPD sesuai dengan juklis

Tahun 2016 Kecamatan Prambon memiliki target pencapaian 60 % sedangkan realisasinya sebesar 100 % dengan tingkat capaian 167 %, dari



tingkat capaian 167 % dapat diambil kesimpulan bahwa Kecamatan Prambon pada tahun 2016 dapat mencapai target yang sudah direncanakan pada awal tahun 2016. Sedangkan tahun 2015 Kecamatan Prambon memiliki target pencapaian 100 % sedangkan realisasinya sebesar 99 % dengan tingkat capaian 106 %, dari tingkat capaian 106 % dapat diambil kesimpulan bahwa Kecamatan Prambon pada tahun 2015 sudah dapat mencapai target yang sudah direncanakan pada awal tahun 2015.

- c) Persentase Desa yang sudah melaksanakan Musrenbang Desa sesuai dengan juklis

Tahun 2016 Kecamatan Prambon memiliki target pencapaian 60 % sedangkan realisasinya sebesar 100 % dengan tingkat capaian 167 %, dari tingkat capaian 167 % dapat diambil kesimpulan bahwa Kecamatan Prambon pada tahun 2016 dapat mencapai target yang sudah direncanakan pada awal tahun 2016. Sedangkan tahun 2015 Kecamatan Prambon memiliki target pencapaian 100 % sedangkan realisasinya sebesar 99 % dengan tingkat capaian 106 %, dari tingkat capaian 106 % dapat diambil kesimpulan bahwa Kecamatan Prambon pada tahun 2015 sudah dapat mencapai target yang sudah direncanakan pada awal tahun 2015.

### c) Pengukuran Capaian Kinerja Program dan Kegiatan

Pengukuran capaian kinerja Program dan Kegiatan tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target realisasi indikator kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 dengan realisasi indikator kinerja Program dan Kegiatan



Tahun 2016, dan selanjutnya juga membandingkan antara target realisasi indikator kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 dengan realisasi indikator kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015. Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Prambon Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 3.4. dibawah ini.

**Tabel 3.4.**  
**Pengukuran Kinerja Program dan Kegiatan**  
**Tahun 2016**

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian 2016 (%)
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Tingkat kepuasan aparatur SKPD terhadap pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>75</b>	<b>77,71</b>	<b>104 %</b>
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang dikelola	3.000 Surat	3.047 Surat	102%
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Biaya Rekening Air, Listrik dan Telepon	12 Bulan	12 Bulan	100%
1.3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan roda 4 dan roda 2 yang dipelihara dan SNK Serta Uji Kir yang di urus	4 Unit Roda 4	4 Unit Roda 4	100%
1.4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan	17 Orang	17 Orang	100%
1.5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan dan Jumlah alat kebersihan yang disediakan	4 Orang dan 172 Buah	4 Orang dan 172 Buah	100%
1.6	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis dan Jumlah alat tulis kantor (ATK) yang disediakan	37 Jenis dan 497 ATK	37 Jenis dan 497 ATK	100%
1.7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis dan Jumlah barang cetak dan penggandaan	6 Jenis dan 24.558 Buah	6 Jenis dan 24.558 Buah	100%
1.8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen listrik kantor yang disediakan	13 Jenis dan 247 Buah	13 Jenis dan 247 Buah	100%
1.9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 Jenis dan 24 Buah	2 Jenis dan 24 Buah	100%
1.10	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Logistik kantor yang diserap	7.900 Liter	7.914 Liter	101%
1.11	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Mamin yang disediakan	765 Kotak	765 Kotak	100%
1.12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah Rapat koordinasi yang dilaksanakan	400 Kali	460 Kali	115%



2	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Prosentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi</b>	100%	100%	100%
2.1	Pembangunan gedung kantor	Jumlah Gedung kantor yang dibangun	3 Paket	3 Paket	100%
2.2	Pengadaan meubelair	Jenis dan Jumlah meubelair yang diadakan	13 Jenis dan 62 Buah	13 Jenis dan 62 Buah	100%
2.3	Pengadaan perlengkapan dan peralatan Rumah Dinas	Jenis dan Jumlah perlengkapan dan peralatan Rumah Dinas yang diadakan	12 Jenis dan 16 Buah	12 Jenis dan 16 Buah	100%
2.4	Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor	Jenis dan Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang diadakan	10 Jenis dan 19 Buah	10 Jenis dan 19 Buah	100%
2.5	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara	8 Gedung	8 Gedung	100%
2.6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	4 Unit	4 Unit	100%
2.7	Pemeliharaan mebelair	Jumlah unit meubelair yang dipelihara	53 Unit	53 Unit	100%
2.8	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan yang dipelihara	158 Unit	158 Unit	100%
2.9	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang di rehab sedang/berat	1 Gedung	1 Gedung	100%
3	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Prosentase aparatur yang disiplin</b>	40 Stel	40 Stel	100%
3.1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari--Hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	40 Stel	40 Stel	100%
4	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang tepat waktu</b>	7 Dokumen dan 1 Laporan	7 Dokumen dan 1 Laporan	100%
4.1	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang disusun dan jumlah laporan capaian kinerja SKPD Yang disusun	7 Dokumen dan 1 Laporan	7 Dokumen dan 1 Laporan	100%
5	<b>Program penyelenggaraan pelayanan umum</b>	<b>Prosentase Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi di kecamatan</b>	12.000 Dokumen	13.822 Dokumen	115%
5.1	Pelayanan	Jumlah Administrasi	12.000	13.822	115%





	adminitrasi kependudukan dan pelayanan umum	kependudukan dan pelayanan umum yang diproses	Dokumen	Dokumen	
<b>6</b>	<b>Program : koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pemb angunan, perekonomian, pemberdayaan sosial masyarakat dan ketentraman ketertiban umum</b>	<b>Prosentase Tingkat kepuasan aparatur SKPD terhadap pelayanan administrasi perkantoran</b>	100%	100%	100%
6.1	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan seksi pemerintahan	Jumlah rakor, Pilkades dan aset desa yang di inventarisir seksi pemerintahan	1 Kali dan 23 Desa	1 Kali dan 23 Desa	100%
6.2	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Seksi perekonomian	Jumlah rakor seksi perekonomian	1 Kali	1 Kali	100%
6.3	Pembinaan dan kerjasama penyelenggaraan kegiatan seksi perekonomian	Jumlah pembinaan wirausahawan baru, penyusunan profil desa dan fasilitasi promosi produk industri dan produk unggulan	1 Buah Pembinaan	1 Buah Pembinaan	100%
6.4	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Seksi ketentraman dan ketertiban	Jumlah rakor dan Kegiatan FKDM seksi ketentraman dan ketertiban	1 Rakor dan 6 Rakor FKDM	1 Rakor dan 6 Rakor FKDM	100%
6.5	Pembinaan dan kerjasama penyelenggaraan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban	Jumlah pembinaan linmas/masyarakat, operasi tibum, penertiban perda dan penanganan bencana	1 Buah Pembinaan	1 Buah Pembinaan	100%
6.7	Pelaksanaan upacara dan lomba seksi ketentraman dan ketertiban	Jumlah upacara hari besar nasional dan pembinaan lomba seksi ketentraman dan ketertiban	1 Kali Upacara	1 Kali Upacara	100%
6.8	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Seksi kesejahteraan sosial	Jumlah rakor seksi kesejahteraan sosial	1 Kali	1 Kali	100%
6.9	Pembinaan dan kerjasama penyelenggaraan kegiatan seksi kesejahteraan sosial	Jumlah pembinaan, fasilitasi rumah tangga miskin, fasilitasi pemuda olahraga beserta bansos dan baksos	2 Buah Pembinaan	2 Buah Pembinaan	100%
6.10	Pelaksanaan pawai budaya dan lomba seksi kesejahteraan sosial	Jumlah Pembinaan Kegiatan Pawai Budaya yang diikuti	1 Kali	1 Kali	100%
6.11	Pembinaan dan kerjasama penyelenggaraan	Jumlah Objek IMB yang disupervisi dan Jumlah desa yang dibina untuk	25 IMB dan 23 Desa	25 IMB dan 23 Desa	100%



	kegiatan seksi pembangunan fisik	lomba Seksi Pembangunan Fisik			
6.12	Pembinaan dan kerjasama penyelenggaraan kegiatan seksi pemerintahan	Jumlah Perangkat desa yang di bina dan Jumlah Desa yang dibina untuk kegiatan lomba seksi pemerintahan	184 Perangkat dan 23 Desa	184 Perangkat dan 23 Desa	100%
6.13	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	Jumlah perdes yang dievaluasi dan desa yang di supervisi administrasinya	23 Perdes	23 Perdes	100%
6.14	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Seksi pembangunan fisik	Jumlah Peserta Musrenbang des yang dimonitor dan Jumlah Musrenbang Kecamatan	100 Peserta	100 Peserta	100%
7	<b>Program : koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, pemberdayaan sosial masyarakat dan ketertarikan umum</b>	<b>Prosentase Tingkat kepuasan aparatur SKPD terhadap pelayanan administrasi perkantoran</b>	800 Pohon	800 Pohon	100%
7.1	Pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah penanaman pohon lindung di ruang Milik Jalan Desa	800 Pohon	800 Pohon	100%

### 3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

#### a) Evaluasi Capaian Kinerja PerSasaran

Setelah Indikator tujuan dan sasaran di ukur sebagaimana point 3.1. tersebut di atas, maka selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisa terhadap hasil capaian Kinerja baik keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian targetnya, evaluasi dan analisa tersebut dapat berupa penjelasan hasil perbandingan antara target dan realisasi atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Pengukuran kinerja persasaran dapat dilihat pada Tabel 3.5 dibawah ini:

**Tabel 3.5.**  
**Evaluasi Capaian kinerja PerSasaran**  
**Tahun 2016**

No.	Sasaran Strategis/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja	Capaian 2016 (%)	Kategori	Penanggung Jawab
-----	--	---	------------------------	----------	---------------------



		Kegiatan (Output)			
<b>1</b>	<b>Sasaran 1</b>				
	Meningkatnya kualitas pelayanan di Kecamatan Wonoayu.	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	104 %	Sangat Berhasil	Sekretariat
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan aparatur SKPD terhadap pelayanan administrasi perkantoran	100 %	Sangat Berhasil	Sekretariat
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang dikelola	102%	Sangat Berhasil	Sekretariat
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Biaya Rekening Air, Listrik dan Telepon	100%	Sangat Berhasil	Sekretariat
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan roda 4 dan roda 2 yang dipelihara dan SNK Serta Uji Kir yang di urus	100%	Sangat Berhasil	Sekretariat
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan	100%	Sangat Berhasil	Sekretariat
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan dan Jumlah alat kebersihan yang disediakan	100%	Sangat Berhasil	Sekretariat
	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis dan Jumlah alat tulis kantor (ATK) yang disediakan	100%	Sangat Berhasil	Sekretariat
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis dan Jumlah barang cetak dan penggandaan	100%	Sangat Berhasil	Sekretariat
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen listrik kantor yang disediakan	100%	Sangat Berhasil	Sekretariat
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	100%	Sangat Berhasil	Sekretariat
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Logistik kantor yang diserap	101%	Sangat Berhasil	Sekretariat
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Mamin yang disediakan	100%	Sangat Berhasil	Sekretariat
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah Rapat koordinasi yang dilaksanakan	115%	Sangat Berhasil	Sekretariat
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi	100%	Sangat Berhasil	Sekretariat
	Pembangunan gedung kantor	Jumlah Gedung kantor yang dibangun	100%	Sangat Berhasil	Sekretariat
	Pengadaan meubelair	Jenis dan Jumlah meubelair yang diadakan	100%	Sangat Berhasil	Sekretariat
	Pengadaan perlengkapan dan peralatan Rumah Dinas	Jenis dan Jumlah perlengkapan dan peralatan Rumah Dinas yang diadakan	100%	Sangat Berhasil	Sekretariat



	Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor	Jenis dan Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang diadakan	100%	Sangat Berhasil	Sekretariat
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara	100%	Sangat Berhasil	Sekretariat
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100%	Sangat Berhasil	Sekretariat
	Pemeliharaan mebelair	Jumlah unit mebelair yang dipelihara	100%	Sangat Berhasil	Sekretariat
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan yang dipelihara	100%	Sangat Berhasil	Sekretariat
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang di rehab sedang/berat	100%	Sangat Berhasil	Sekretariat
	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase aparatur yang disiplin	100%	Sangat Berhasil	Sekretariat
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari--Hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	100%	Sangat Berhasil	Sekretariat
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang tepat waktu	100%	Sangat Berhasil	Sekretariat
	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang disusun dan jumlah laporan capaian kinerja SKPD Yang disusun	100%	Sangat Berhasil	Sekretariat
	Program penyelenggaraan pelayanan umum	Prosentase Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi di kecamatan	115%	Sangat Berhasil	Sekretariat
	Pelayanan adminitrasi kependudukan dan pelayanan umum	Jumlah Administrasi kependudukan dan pelayanan umum yang diproses	115%	Sangat Berhasil	Sekretariat
<b>2</b>	<b>Sasaran 2</b>				
	Persentase hasil koordinasi pada setiap bidang	Persentase hasil koordinasi pada setiap bidang	167	Sangat Berhasil	Kasi-Kasi
	Program : koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pemba ngunan, perekonomian, pemberdayaan sosial	Prosentase Tingkat kepuasan aparatur SKPD terhadap pelayanan administrasi perkantoran	100%	Sangat Berhasil	Kasi-Kasi



	masyarakat dan ketentraman ketertiban umum				
	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan seksi pemerintahan	Jumlah rakor, Pilkades dan aset desa yang di inventarisir seksi pemerintahan	100%	Sangat Berhasil	Kasi Pemerintahan
	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Seksi perekonomian	Jumlah rakor seksi perekonomian	100%	Sangat Berhasil	Kasi Perekonomian
	Pembinaan dan kerjasama penyelenggaraan kegiatan seksi perekonomian	Jumlah pembinaan wirausahawan baru, penyusunan profil desa dan fasilitasi promosi produk industri dan produk unggulan	100%	Sangat Berhasil	Kasi Perekonomian
	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Seksi ketentraman dan ketertiban	Jumlah rakor dan Kegiatan FKDM seksi ketentraman dan ketertiban	100%	Sangat Berhasil	Kasi Ketentraman dan Ketertiban
	Pembinaan dan kerjasama penyelenggaraan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban	Jumlah pembinaan linmas/masyarakat, operasi tibum, penertiban perda dan penanganan bencana	100%	Sangat Berhasil	Kasi Ketentraman dan Ketertiban
	Pelaksanaan upacara dan lomba seksi ketentraman dan ketertiban	Jumlah upacara hari besar nasional dan pembinaan lomba seksi ketentraman dan ketertiban	100%	Sangat Berhasil	Kasi Ketentraman dan Ketertiban
	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Seksi kesejahteraan sosial	Jumlah rakor seksi kesejahteraan sosial	100%	Sangat Berhasil	Kasi Kesejahteraan Sosial
	Pembinaan dan kerjasama penyelenggaraan kegiatan seksi kesejahteraan sosial	Jumlah pembinaan, fasilitasi rumah tangga miskin, fasilitasi pemuda olahraga beserta bansos dan baksos	100%	Sangat Berhasil	Kasi Kesejahteraan Sosial
	Pelaksanaan pawai budaya dan lomba seksi kesejahteraan sosial	Jumlah Pembinaan Kegiatan Pawai Budaya yang diikuti	100%	Sangat Berhasil	Kasi Kesejahteraan Sosial
	Pembinaan dan kerjasama penyelenggaraan kegiatan seksi pembangunan fisik	Jumlah Objek IMB yang disupervisi dan Jumlah desa yang dibina untuk lomba Seksi Pembangunan Fisik	100%	Sangat Berhasil	Kasi Pembangunan Fisik
	Pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah penanaman pohon lindung di ruang Milik Jalan Desa	100%	Sangat Berhasil	Kasi Pembangunan Fisik
<b>3</b>	<b>Sasaran 3</b>				
	Meningkatkan penyelenggaraan	Persentase desa yang sudah menyusun APBDesa sesuai dengan Juknis,	167	Sangat Berhasil	Kasi-Kasi



	pemerintahan desa	Persentase desa yang sudah menyusun LPPD sesuai dengan Juknis dan Persentase desa yang sudah melaksanakan musrenbang desa sesuai dengan Juknis			
	<b>Program : koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, pemberdayaan sosial masyarakat dan ketertiban umum</b>	<b>Prosentase Tingkat kepuasan aparatur SKPD terhadap pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>Sangat Berhasil</b>	<b>Kasi-Kasi</b>
	Pembinaan dan kerjasama penyelenggaraan kegiatan seksi pemerintahan	Jumlah Perangkat desa yang di bina dan Jumlah Desa yang dibina untuk kegiatan lomba seksi pemerintahan	100%	Sangat Berhasil	Kasi Pemerintahan
	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	Jumlah perdes yang dievaluasi dan desa yang di supervisi administrasinya	100%	Sangat Berhasil	Kasi Pemerintahan
	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Seksi pembangunan fisik	Jumlah Peserta Musrenbang des yang dimonitor dan Jumlah Musrenbang Kecamatan	100%	Sangat Berhasil	Kasi Pembangunan Fisik

Keterangan:

No.	% Capaian	Kategori
1.	Lebih dari 90%	Sangat Berhasil
2.	75% s.d Kurang Dari 90%	Berhasil
3.	50% s.d Kurang Dari 75%	Cukup
4.	Kurang Dari 50%	Kurang

#### b) Perkembangan (tren) Capaian Kinerja

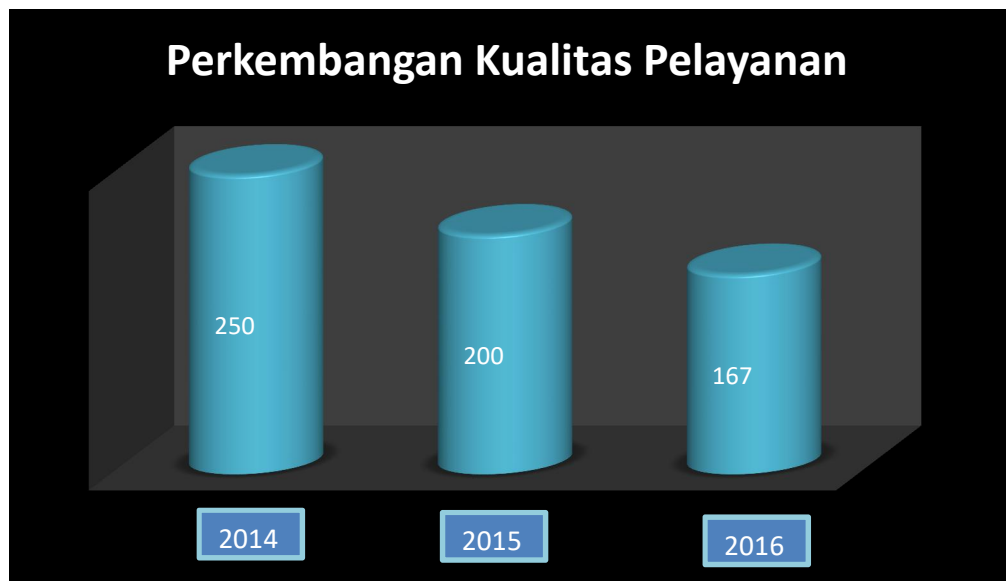
Setelah dilakukan pengukuran kinerja pada tahun 2016 maka selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisa terhadap hasil capaian kinerja, yaitu dengan mengukur tingkat keberhasilan kinerja masing-masing indikator tiap individu.



Perkembangan tren dari capaian kinerja persasaran dapat dilakukan terhadap capaian kinerja selama 3 tahun terakhir pada 3 sasaran Kecamatan Prambon

1. Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan Prambon

2014		2015		2016	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
65	68,23	70	74,12	75	77,71



2. Sasaran 2 : Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan dan pembangunan

- Prosentase hasil koordinasi bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti

2014		2015		2016	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
40	100 %	50	100%	60	100%



- Prosentase hasil koordinasi bidang perekonomian yang ditindaklanjuti

2014		2015		2016	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
40	100 %	50	100%	60	100%

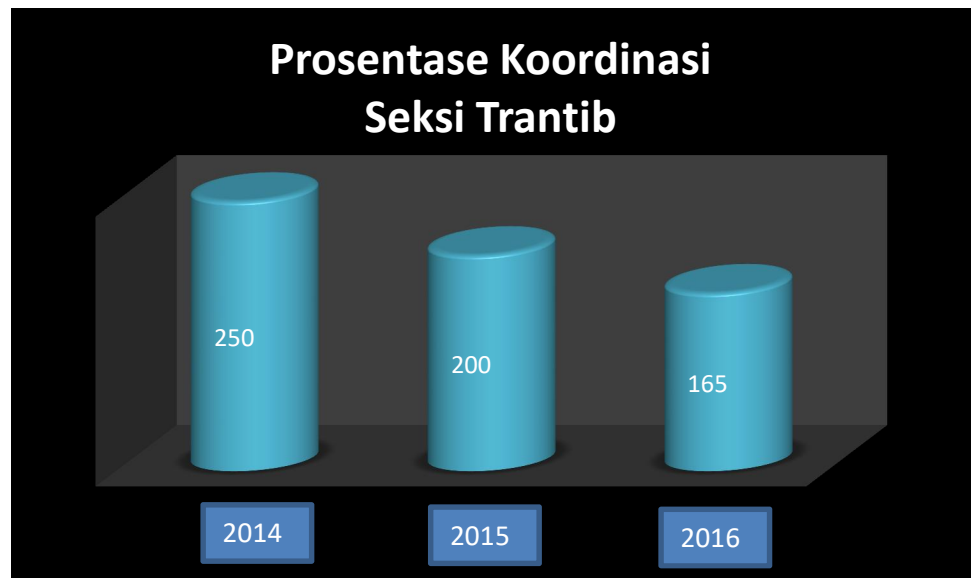






- Prosentase hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban yang ditindaklanjuti

2014		2015		2016	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
40	100 %	50	100%	60	99%



- Prosentase hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti

2014		2015		2016	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
40	100 %	50	100%	60	100%



- Prosentase hasil koordinasi bidang pembangunan fisik yang ditindaklanjuti



2014		2015		2016	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
40	100 %	50	100%	60	100%



3. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa

- Persentase desa yang sudah menyusun APBDesa sesuai dengan Juknis

2014		2015		2016	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
40	98 %	50	99%	60	100%



- Persentase desa yang sudah menyusun LPPD sesuai dengan Juknis

2014		2015		2016	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
40	98 %	50	99%	60	100%





- Persentase desa yang sudah melaksanakan musrenbang desa sesuai dengan Juknis

2014		2015		2016	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
40	98 %	50	99%	60	100%



**c) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan**

Setelah Kecamatan Prambon melakukan Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis , selanjutnya analisa keberhasilan dan kegagalan yaitu dapat meliputi penjelasan keberhasilan dan kegagalan dan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menghadapi permasalahan - permasalahan pencapaian kinerja tersebut, serta rencana tindakan apa yang akan dilakukan untuk pencapaian yang lebih baik pada tahun anggaran 2016.

Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Kecamatan Prambon

- **Kendala/Permasalahan yang dihadapi:**
- **Upaya yang Telah Dilakukan:**
- **Rencana Tindak Lanjut Tahun Berikutnya:**



Sasaran 2 : Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan dan pembangunan

- Kendala/Permasalahan yang dihadapi:
- Upaya yang Telah Dilakukan:
- Rencana Tindak Lanjut Tahun Berikutnya:

Sasaran 3 : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa

- Kendala/Permasalahan yang dihadapi:
- Upaya yang Telah Dilakukan:
- Rencana Tindak Lanjut Tahun Berikutnya:

#### d) Program / Kegiatan yang mendukung

Proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik (Renstra). Strategi pembangunan daerah menurut RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2016 yang dijabarkan melalui Renstra SKPD Kantor Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo, dilaksanakan dengan menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah, yang diharapkan mampu mengarahkan setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan fokus pada pencapaian tujuan dan sasaran, ditetapkan arah kebijakan daerah/SKPD yang berisi kebijakan umum, program, dan kegiatan. Renja Kecamatan Prambon adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu 1 tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Kecamatan Prambon pada tahun 2016 memiliki 7 Program dan 37 Kegiatan yang tertuang dalam Renja tahun 2016. Dari Renja SKPD terbit DPA SKPD yang saling berkaitan satu sama lainnya. Program / kegiatan Kantor Kecamatan Prambon yang mendukung sesuai dengan DPA Perubahan Tahun Anggaran 2016.



Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan Wonoayu

**Tabel 3.x.**  
**Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran 1**  
**Tahun 2016**

Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Hasil Capaian			Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Hasil Capaian			
		Target	Realisasi	% Capaian			Target	Realisasi	% Capaian	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan aparatur SKPD terhadap pelayanan administrasi perkantoran	60 %								
			100%	100%						
						Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang dikelola	3.000 Surat	2200 Surat	73%
						Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Biaya Rekening Air, Listrik dan Telepon	12 Bulan	12 Bulan	100%
						Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaran roda 4 dan roda 2 yang dipelihara dan SNK Serta Uji Kir yang di urus	4 Unit Roda 4	4 Unit Roda 4	100%
				Penyediaan jasa administrasi	Jumlah Pejabat	17 Oran	17 Oran	100%		



					keuangan	t Pengel ola Admini strasi Keuan gan	g	g	
					Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan dan Jumlah alat kebersihan yang disediakan	4 Orang dan 172 Buah	4 Orang dan 172 Buah	100%
					Penyediaan alat tulis kantor	Jenis dan Jumlah alat tulis kantor (ATK) yang disediakan	37 Jenis dan 497 ATK	37 Jenis dan 497 ATK	100%
					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis dan Jumlah barang cetak dan penggandaan	6 Jenis dan 24.558 Buah	6 Jenis dan 24.558 Buah	100%
					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen listrik kantor yang disediakan	13 Jenis dan 247 Buah	13 Jenis dan 247 Buah	100%
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	Jumlah bahan bacaan	2 Jenis dan	2 Jenis dan	100%



					undangan	n dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	24 Buah	24 Buah	
					Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Logistik kantor yang diserahkan	7.900 Liter	7.900 Liter	100%
					Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Mamin yang disediakan	765 Kotak	765 Kotak	100%
					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah Rapat koordinasi yang dilaksanakan	400 Kali	400 Kali	100%
<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Prosentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi</b>	<b>100%</b>							
					Pembangunan gedung kantor	Jumlah Gedung kantor yang dibangun	3 Paket	3 Paket	100%
					Pengadaan meubelair	Jenis dan Jumlah meubelair yang diadakan	13 Jenis dan 62 Buah	13 Jenis dan 62 Buah	100%
					Pengadaan perlengkapan	Jenis	12	12	100%





					n dan peralatan Rumah Dinas	dan Jumlah perlengkapan dan peralatan Rumah Dinas yang diadakan	Jenis dan 16 Buah	Jenis dan 16 Buah	
					Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor	Jenis dan Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang diadakan	10 Jenis dan 19 Buah	10 Jenis dan 19 Buah	100%
					Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara	8 Gedung	8 Gedung	100%
					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	4 Unit	4 Unit	100%
					Pemeliharaan mebelair	Jumlah unit mebelair yang dipelihara	53 Unit	53 Unit	100%



						ara			
					Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan yang dipelihara	158 Unit	158 Unit	100%
					Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang di rehab sedang /berat	1 Gedung	1 Gedung	100%
<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>									
					Pengadaan Pakaian Khusus Hari--Hari Tertentu				
<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>									
					Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD				
<b>Program penyelenggaraan pelayanan umum</b>									
					Pelayanan adminitrasi kependudukan dan pelayanan umum				



Sasaran 2 : Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan dan pembangunan

**Tabel 3.x.**  
**Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran 2**  
**Tahun 2016**

Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Hasil Capaian			Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Hasil Capaian		
		Target	Realisasi	% Capaian			Target	Realisasi	% Capaian
Program : koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, pemberdayaan sosial masyarakat dan ketertarikan ketertiban umum									
					Koordinasi penyelenggaraan kegiatan seksi pemerintahan				
					Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Seksi perekonomian				
					Pembinaan dan kerjasama penyelenggaraan kegiatan seksi perekonomian				
					Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Seksi ketertarikan dan ketertiban				
					Pembinaan dan kerjasama penyelenggaraan kegiatan seksi ketertarikan dan ketertiban				
					Pelaksanaan upacara dan lomba seksi ketertarikan dan ketertiban				
					Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Seksi kesejahteraan sosial				
					Pembinaan dan kerjasama penyelenggaraan kegiatan seksi kesejahteraan				



					sosial				
					Pelaksanaan pawai budaya dan lomba seksi kesejahteraan sosial				
					Pembinaan dan kerjasama penyelenggaraan kegiatan seksi pembangunan fisik				
	Pengelolaan lingkungan hidup				Pengelolaan lingkungan hidup				

Sasaran 3 : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa

**Tabel 3.x.**  
**Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran 3**  
**Tahun 2016**

Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Hasil Capaian			Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Hasil Capaian		
		Target	Realisasi	% Capaian			Target	Realisasi	% Capaian
Program : koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, pemberdayaan sosial masyarakat dan ketentraman ketertiban umum									
					Pembinaan dan kerjasama penyelenggaraan kegiatan seksi pemerintahan				
					Pengawasan				



					penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan				
					Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Seksi pembangunan fisik				

### 3.3. Akuntabilitas Keuangan

#### a. Realisasi Anggaran

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Kantor Kecamatan Prambon dapat diuraikan sebagai berikut:

Target dan realisasi belanja per Program/Kegiatan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

**Tabel 22.**  
**Target dan realisasi belanja per Program/Kegiatan tahun 2016**

Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
	Penyediaan jasa surat menyurat			
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			
	Penyediaan jasa administrasi keuangan			
	Penyediaan jasa kebersihan kantor			
	Penyediaan alat tulis kantor			
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			



	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			
	Penyediaan bahan logistik kantor			
	Penyediaan makanan dan minuman			
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah			
<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>				
	Pembangunan gedung kantor			
	Pengadaan meubelair			
	Pengadaan perlengkapan dan peralatan Rumah Dinas			
	Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor			
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			
	Pemeliharaan mebelair			
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor			
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor			
<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>				
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari--Hari Tertentu			
<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>				
	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD			
<b>Program penyelenggaraan pelayanan umum</b>				
	Pelayanan adminitrasi kependudukan dan pelayanan umum			
<b>Program : koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan,pembangunan, perekonomian, pemberdayaan</b>				



<b>sosial masyarakat dan ketentraman ketertiban umum</b>				
	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan seksi pemerintahan			
	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Seksi perekonomian			
	Pembinaan dan kerjasama penyelenggaraan kegiatan seksi perekonomian			
	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Seksi ketentraman dan ketertiban			
	Pembinaan dan kerjasama penyelenggaraan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban			
	Pelaksanaan upacara dan lomba seksi ketentraman dan ketertiban			
	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Seksi kesejahteraan sosial			
	Pembinaan dan kerjasama penyelenggaraan kegiatan seksi kesejahteraan sosial			
	Pelaksanaan pawai budaya dan lomba seksi kesejahteraan sosial			
	Pembinaan dan kerjasama penyelenggaraan kegiatan seksi pembangunan fisik			
	Pembinaan dan kerjasama penyelenggaraan kegiatan seksi pemerintahan			
	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan			
	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Seksi pembangunan fisik			
<b>Program : koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, pemberdayaan sosial masyarakat dan ketentraman ketertiban umum</b>				
	Pengelolaan lingkungan hidup			

Secara garis besar hambatan dan kendala yang ada dalam pelaksanaan pencapaian target yang telah ditetapkan oleh Kantor Kecamatan Prambon adalah sebagai berikut :



1. Belum validnya data tentang administrasi barang daerah yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah.
2. Belum sinerginya hubungan antar pengelola keuangan daerah di Satuan Kerja Perangkat Daerah.
3. Tuntutan perkembangan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup, yaitu di satu sisi pembangunan harus tetap berjalan di pihak lain kelestarian dan fungsi lingkungan harus tetap terjaga sesuai dengan peruntukannya.
4. Terdapat Kegiatan yang tidak dapat direalisasikan karena Kegiatan dilaksanakan tahun berikutnya oleh Bappeda. Program tersebut adalah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja SKPD dan Keempatannya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, kegiatan ini di tujukan untuk perencanaan RENSTRA 2016-2020.

#### b. Alokasi Anggaran PerSasaran

Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Kecamatan Prambon

Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		699.845.000		
	Penyediaan jasa surat menyurat			
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	94.650.000	80.114.849	84,64 %
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	8.000.000	3.238.400	40,48 %
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	218.250.000	225.900.000	103,51 %
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	102.000.000	94.000.000	92,16 %
	Penyediaan alat tulis kantor	31.820.000	31.820.000	100 %
	Penyediaan barang cetakan dan	12.000.000	12.000.000	100 %





	pengandaan			
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12.000.000	12.000.000	100 %
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8.000.000	6.730.000	84,13 %
	Penyediaan bahan logistik kantor	110.000.000	107.500.000	97,73 %
	Penyediaan makanan dan minuman	23.125.000	22.300.000	96,43 %
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	80.000.000	67.675.539	84,59 %
<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>				
	Pengadaan meubelair	7.500.000	7.500.000	100 %
	Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor	484.750.000	452.319.150	93,31 %
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	30.000.000	0	0 %
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	23.000.000	22.691.750	98,66 %
	Pemeliharaan mebelair	0		
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor	22.500.000	46.147.000	205,10 %
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	352.000.000	269.143.000	76,46 %
<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>				
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari--Hari Tertentu	7.500.000	6.000.000	80 %
<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>				
	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD	45.000.000	42.556.500	94,57 %
<b>Program penyelenggaraan pelayanan umum</b>				
	Pelayanan adminitrasi	141.470.000	65.696.620	46,44 %



	kependudukan dan pelayanan umum			
--	---------------------------------	--	--	--

Sasaran 2 : Meningkatkan koordinasi bidang pemerintahan dan pembangunan

Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
<b>Program : koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, pemberdayaan sosial masyarakat dan ketentraman ketertiban umum</b>				
	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan seksi pemerintahan	30.854.000	11.964.000	38,78 %
	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Seksi perekonomian	9.600.000	0	0 %
	Pembinaan dan kerjasama penyelenggaraan kegiatan seksi perekonomian	13.820.000	11.420.000	82,63%
	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Seksi ketentraman dan ketertiban	9.600.000	5.840.000	60,83 %
	Pembinaan dan kerjasama penyelenggaraan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban	52.820.000	51.060.000	96,67 %
	Pelaksanaan upacara dan lomba seksi ketentraman dan ketertiban	44.640.000	42.370.000	94,91 %
	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Seksi kesejahteraan sosial	9.600.000	9.600.000	100 %
	Pembinaan dan kerjasama penyelenggaraan kegiatan seksi kesejahteraan sosial	5.020.000	5.020.000	100 %
	Pelaksanaan pawai budaya dan lomba seksi kesejahteraan sosial	76.000.000	55.500.000	86,18 %
	Pembinaan dan kerjasama penyelenggaraan kegiatan seksi pembangunan fisik	58.470.000	58.470.000	100 %
	Pengelolaan lingkungan hidup	59.845.000	57.525.000	96,12 %



## Sasaran 3 : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa

Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
<b>Program : koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, pemberdayaan sosial masyarakat dan ketentraman ketertiban umum</b>				
	Pembinaan dan kerjasama penyelenggaraan kegiatan seksi pemerintahan	<b>8.495.000</b>	<b>9.295.000</b>	<b>109,42 %</b>
	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	<b>3.200.000</b>	<b>1.990.000</b>	<b>60,83 %</b>
	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Seksi pembangunan fisik	<b>118.020.000</b>	<b>112.220.000</b>	<b>95,09 %</b>



## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kecamatan Prambon ini, merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang AKIP yang selanjutnya disempurnakan di dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan sistematika Penyusunannya didasarkan pada Peraturan Menteri PAN – RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang ‘Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP Kantor Kecamatan Prambon ini bertujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Program Kegiatan melalui kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kantor Kecamatan Prambon guna mencapai sasaran Kantor Kecamatan Prambon.

1. Meningkatnya tertib administrasi perkantoran dan tertib penyusunan dan penyampain laporan
2. Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai/memenuhi syarat
3. Meningkatnya pembinaan, pengembangan dan peningkatan SDM masyarakat
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
5. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai luhur budaya bangsa



#### 4.2 Saran

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kecamatan Prambon ini masih jauh dari sempurna, namun setidaknya dari LAKIP ini kita semua jadi tahu seberapa besar keberhasilan kinerja Instansi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo khususnya Kantor Kecamatan Prambon dalam melakukan pelayanan dan melaksanakan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo dalam rangka mencapai sasaran visi Kantor Kecamatan Prambon.

Dari beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2016 masih terdapat beberapa kegiatan yang berlanjut di tahun 2016. Hal ini kita laksanakan berdasarkan hasil evaluasi akhir tahun 2016 dimana masih diperlukan kegiatan tersebut pada waktu yang akan datang. Disamping itu juga sebagai pendorong peningkatan kinerja yang ada sehingga target yang direncanakan dapat tercapai.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo tahun 2016 ini disusun agar dapat bermanfaat bagi kita semua.

**CAMAT PRAMBON**

**FREDIK SUHARTO, S.Sos,MM**

Pembina

NIP. 19700202 199101 1 002